

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH MELALUI BELANJA MODAL
(Studi Kasus Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2012-2016)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

DAYANA NOVITA CANDRA KUMALA

145020101111049

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal (Studi Kasus Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)"

Yang disusun oleh :

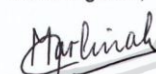
Nama : Dayana Novita Candra Kumala
NIM : 145020101111049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **07 Juni 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA.
NIP. 19710111 199802 1 001
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Susilo, SE., MS.
NIP. 19601030 198601 1 001
(Dosen Penguji I)
3. Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.
NIP. 19631116 199002 1 001
(Dosen Penguji II)

Malang, 07 Juni 2018
Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 19650311 198903 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan DBH terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal
(Studi Kasus pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2012-2016)**

Yang disusun oleh :

Nama : Dayana Novita Candra Kumala
NIM : 145020101111049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Konsentrasi Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dr. Martina Ekawaty, SE.,M.Si.
NIP. 19650311 198903 2 001

Malang,
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Dr. Moh. Khusaini, SE.,M.Si.,MA.
NIP. 19710111 199802 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Dayana Novita Candra Kumala
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 14 Juli 1996
NIM : 145020101111049
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuanga Negara dan Keuangan Daerah
Alamat : Jln. Kertosentono No. 71

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

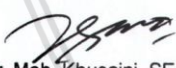
**Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan DBH terhadap
Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012-2016)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat
atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar
kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,


Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA.
NIP. 19710111 199802 1 001


Malang,

Yang membuat pernyataan,



Dayana Novita Candra Kumala
NIM. 145020101111049

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Ekonomi Ombangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP.19650311 198903 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dayana Novita Candra Kumala

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 14 Juli 1996

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Ds. Ngampel Rt.0 Rw. Kec. Balong Kab. Ponorogo

Alamat Email : dayananovita14@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2002-2008) : MI Muhammadiyah 12 Ngampel

SMP (2008-2011) : MTSN Jetis Ponorogo

SMA (2011-2014) : SMAN 2 Ponorogo

Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.



Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan :

1. Staff tetap divisi inventaris departemen kesekretariatan HMJIE 2014
2. Asco divisi admin Be Smart IE FEB UB 2014
3. Staff divisi hubungan masyarakat (humas) ESBC FEB UB 2015
4. Staff divisi SPV TRANSFORMER IE FEB UB 2015
5. Staff divisi SPV PK2MABA RAJA BRAWIJAYA UB 2016
6. Staff divisi SPV PBPB RAJA BRAWIJAYA UB 2016
7. Staff divisi hubungan masyarakat (humas) PHOSE FEB UB 2016

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah, 6-8)



KATA PENGANTAR

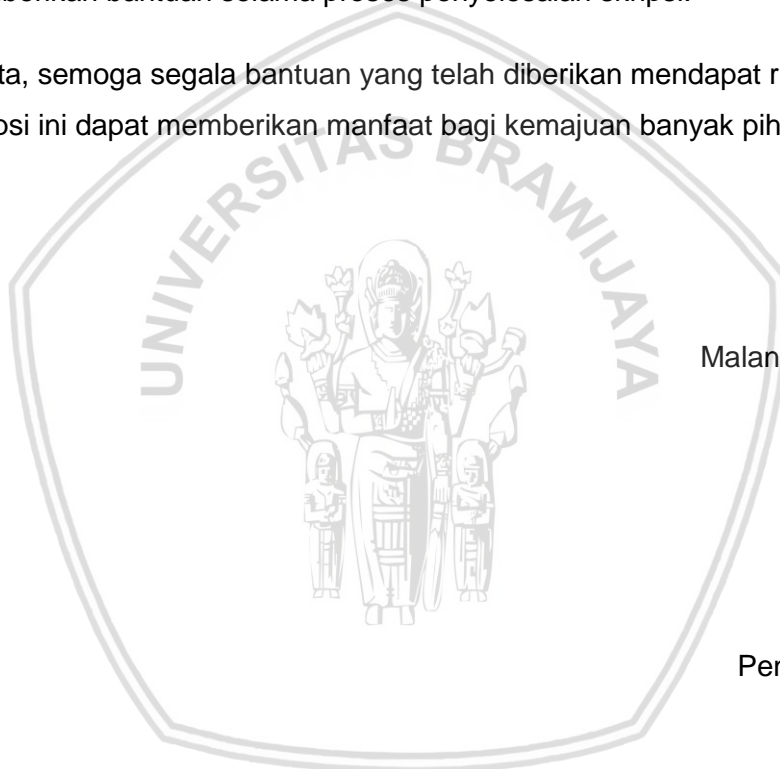
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, ridho dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016)”**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Maka dari itu pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah melancarkan proses dalam pembuatan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Imam Mahfudh dan Ibu Sri Wahyuti, adik penulis, Muhammad Arkan Firdaus Al-Farraby, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, membantu, memberikan semangat dan motivasi untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi, serta memberikan dukungan materi dalam setiap langkah saya.
3. Bapak Dr. Moh. Khusaini, SE. M. Si., MA. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pengarahan, saran dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc.), Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
7. Bapak Dr. Susilo, SE., MS. selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah sangat banyak membantu memberikan masukan terhadap perbaikan skripsi saya.
8. Bapak Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si. selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

9. Sahabat-sahabat penulis, Rissa Affullaila Nurfitria, Indri Septyaningrum, Dwi Eliana Sari, Laras De Arnetta dan Dwi Puji yang selalu menemani, menghibur, serta menyemangati dan memotivasi penulis selama proses penyelesaian skripsi.
10. Dhia Nadhifah selaku teman seperjuangan selama KKN-P dan Ima Dwiana yang telah menemani penulis sejak semester satu, menemani dan membantu selama proses penelitian, menyemangati dan memotivasi penulis selama proses penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa prodi Ekonomi Pembangunan khususnya konsentrasi Keuangan Negara dan Daerah 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta motivasi selama penyelesaian skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah banyak memberikan bantuan selama proses penyelesaian skripsi.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat ridho Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan banyak pihak.



Malang, 07 Juni 2018

Penulis

ABSTRAK**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016)****Dayana Novita Candra Kumala, Moh. Khusaini.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: dayananovita14@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data PDB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016. Data yang digunakan bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, serta sumber data keuangan terkait lainnya. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (path analysis). Hasil analisis model pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

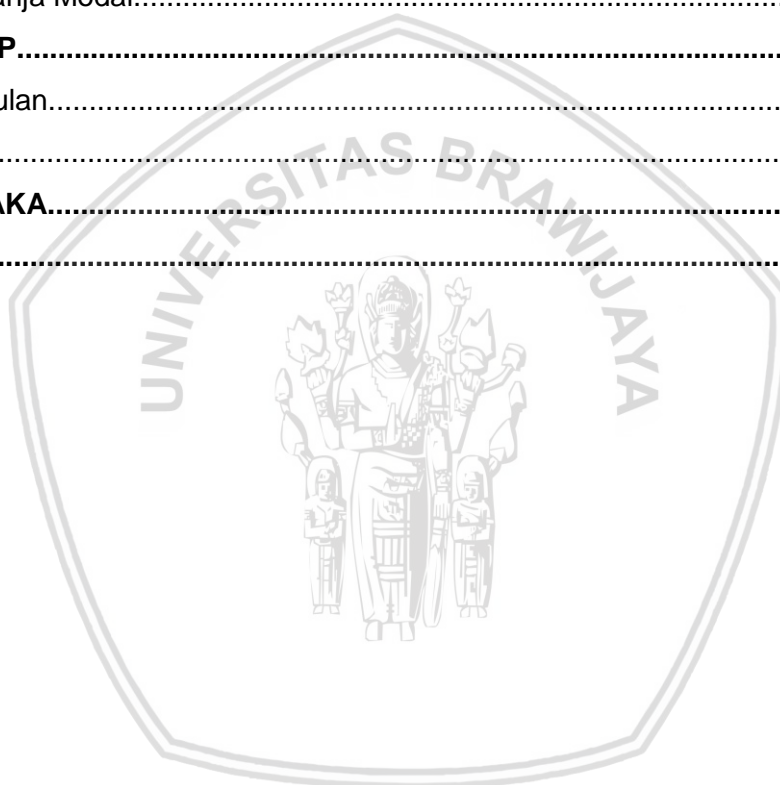
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Otonomi Daerah.....	17
2.2 Desentralisasi Fiskal.....	20
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	22
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28
2.5 Belanja Modal.....	30
2.6 Dana Perimbangan.....	33
2.6.1 Dana Alokasi Umum.....	34
2.6.2 Dana Bagi Hasil.....	36
2.6.3 Dana Alokasi Khusus.....	37
2.7 Pertumbuhan Ekonomi.....	39
2.7.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	40
2.7.2 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar.....	41
2.7.3 Teori Pertumbuhan Neo Klasik.....	43
2.7.4 Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow.....	44

2.8	Teori Makro : Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	45
2.9	Hubungan PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	46
2.10	Penelitian Terdahulu.....	53
2.11	Kerangka Pikir.....	59
2.12	Hipotesis Penelitian.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....		61
3.1	Pendekatan Penelitian.....	61
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	61
3.2.1	Jenis Data.....	61
3.2.2	Sumber Data.....	62
3.3	Definisi Operasional.....	62
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.5	Populasi dan Sampel.....	65
3.6	Metode Analisis.....	65
3.6.1	Pemilihan Model Estimasi.....	66
3.6.2	Pemilihan Metode Estimasi.....	67
3.6.3	Analisis Path.....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		72
4.1	Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	72
4.1.1	Kondisi Geografi Provinsi Jawa Tengah.....	72
4.1.2	Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah.....	74
4.1.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	74
4.1.4	Pendapatan Asli Daerah.....	75
4.1.5	Dana Alokasi Umum.....	76
4.1.6	Dana Alokasi Khusus.....	76
4.1.7	Dana Bagi Hasil.....	77
4.1.8	Belanja Modal.....	77
4.2	Pemilihan Model dan Metode Estimasi.....	78
4.3	Hasil Analisis Jalur.....	83
4.3.1	Hasil Pengujian Pengaruh PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4) terhadap Belanja Modal (Y1)	83
4.3.2	Hasil Pengujian Pengaruh PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4), dan Belanja Modal (Y1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2).....	83
4.3.3	Ketetapan Model Penelitian.....	91

4.3.4	Pengaruh Tidak Langsung.....	92
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	94
4.4.1	Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.....	94
4.4.2	Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal.....	96
4.4.3	Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	100
4.4.4	Pengaruh DAU, DAK, DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	102
4.4.5	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	106
4.4.6	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal.....	108
4.4.7	Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal.....	110
BAB V	PENUTUP.....	114
5.1	Kesimpulan.....	114
5.2	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....		xvi
LAMPIRAN.....		118



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2012-2016 (persen)	3
Tabel 1. 2 : Peningkatan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (%).....	11
Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu.....	54
Tabel 4. 1 : Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2012 s.d 2016 (juta rupiah).....	74
Tabel 4. 2 : Hasil Uji Chow (Chow Test) Persamaan Struktural 1.....	79
Tabel 4. 3 : Hasil Uji Chow (Chow Test) Persamaan Struktural 2.....	79
Tabel 4. 4 : Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test) Persamaan Struktural 1.....	80
tabel 4. 5 : Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan Struktural 2.....	81
Tabel 4. 6 : Hasil Uji Hausman Persamaan Struktural 1.....	82
Tabel 4. 7 : Hasil Uji Hausman Persamaan Struktural 2.....	82
Tabel 4. 8 : Hasil Uji Persamaan 1, Pengaruh PAD (X1), DAU (X2), DAK(X3), dan DBH (X4) Terhadap Belanja Modal (Y1).....	84
Tabel 4. 9 : Hasil Estimasi <i>Cross Section</i> Persamaan Belanja Modal.....	85
Tabel 4. 10 : Hasil Uji Persamaan Struktural 2.....	87
Tabel 4. 11 : Hasil Estimasi <i>Cross Section</i> Persamaan Pertumbuhan Ekonomi.....	90
Tabel 4. 12 : Pengaruh Tidak Langsung Variabel Independen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal.....	93
Tabel 4. 13 : Rata-rata Belanja Pegawai dan Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Dalam Juta Rupiah).....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 : Rata-Rata PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (Milliar Rupiah)	5
Gambar 1. 2 : Rata-rata PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal 6 Provinsi Pulau Jawa.....	7
Gambar 1. 3 : Grafik Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	8
Gambar 1. 4 : Rata-Rata Belanja Pegawai, belanja modal, belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	10
Gambar 1. 5 : Rata-Rata Perkembangan PAD, DAU, DAK, dan DBH Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	12
 Gambar 2. 1: Kerangka Pikir.....	 59
Gambar 2. 2: Kerangka Konseptual.....	59
 Gambar 3. 1: Diagram Jalur.....	 70
Gambar 4. 1: Model Hasil Analisis Jalur.....	89
Gambar 4. 2 : Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014.....	95
Gambar 4. 3 : Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	101
Gambar 4. 4 : Grafik Total Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	118
Lampiran 2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	120
Lampiran 3 : Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	122
Lampiran 4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	124
Lampiran 5 : Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	126
Lampiran 6 : Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	128
Lampiran 7 : Tabel Hasil Uji Chow.....	130
Lampiran 8 : Tabel Hasil Uji Hausman.....	131
Lampiran 9 : Tabel Hasil Uji Langrange Multiplier.....	132
Lampiran 10 : Tabel Hasil Regresi.....	134



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan dilakukan secara terencana sehubungan dengan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita (Suparmoko,2002). Pembangunan ekonomi diperlukan suatu Negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan mengembangkan semua bidang kegiatan Negara tersebut. Untuk itu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan distribusi pendapatan yang merata.

Pada saat ini pembangunan daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini ditandai dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Pada bulan januari 2001 Indonesia mulai melaksanakan perubahan sistem pemerintah yang ditandai dengan dilaksanakannya otonomi daerah di seluruh kabupaten dan kota. Hakikat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah

termasuk didalamnya pengelolaan keuangan. Otonomi daerah juga menyebabkan perubahan sistem administrasi yang awalnya sentralisasi dimana segala urusan pemerintah daerah termasuk dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan diatur oleh pusat, maka setelah peraturan tersebut diberlakukan diganti dengan sistem yang lebih memberi kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola daerahnya atau disebut desentralisasi. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah meningkatkan kegiatan perekonomian dan pesatnya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan kegiatan operasional daerahnya sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah harus mampu menggali dan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerahnya dan dituntut untuk bisa mandiri. Desentralisasi fiskal tersebut membuat daerah menerima beberapa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dalam segala bidang kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut disertai dengan pelimpahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan ataupun bantuan pendanaan dari transfer ke daerah.

Indikator analisis pembangunan ekonomi suatu Negara yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan membandingkan perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Setiawan dan Handoko, 2005). Pengukuran pertumbuhan ekonomi tersebut biasanya didukung oleh pertumbuhan ekonomi dari tiap daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah

sendiri dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB tersebut yang nantinya akan menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terdiri dari enam provinsi yang berada didalamnya dengan jumlah penduduk tertinggi dan juga kapasitas fiskal yang tinggi. Daerah dengan kemampuan kapasitas fiskal yang tinggi, maka akan mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat. Presentase laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa periode tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2012-2016 (persen)

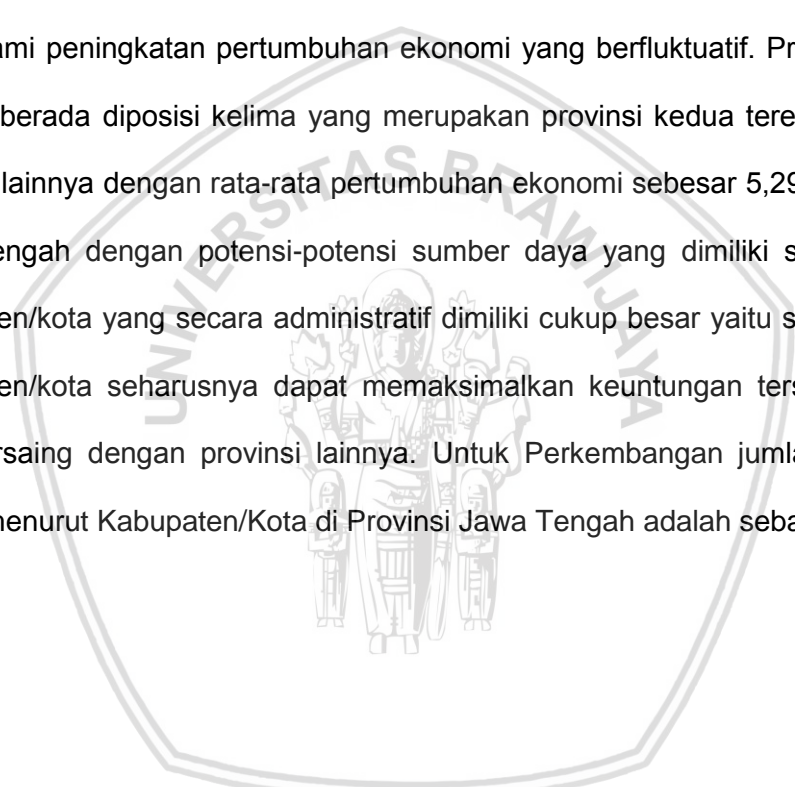
PROVINSI	Laju Pertumbuhan Ekonomi					Rata-rata pertumbuhan ekonomi
	2012	2013	2014	2015	2016	
DKI	6,53	6,07	5,91	5,89	5,85	6,05
Banten	6,83	6,67	5,51	5,4	5,26	5,93
Jawa Barat	6,5	6,33	5,09	5,04	5,67	5,73
Jawa Tengah	5,34	5,11	5,27	5,47	5,28	5,29
DIY	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,20
Jawa Timur	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55	5,91
Indonesia	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02	5,3

Sumber: bps, data diolah 2018

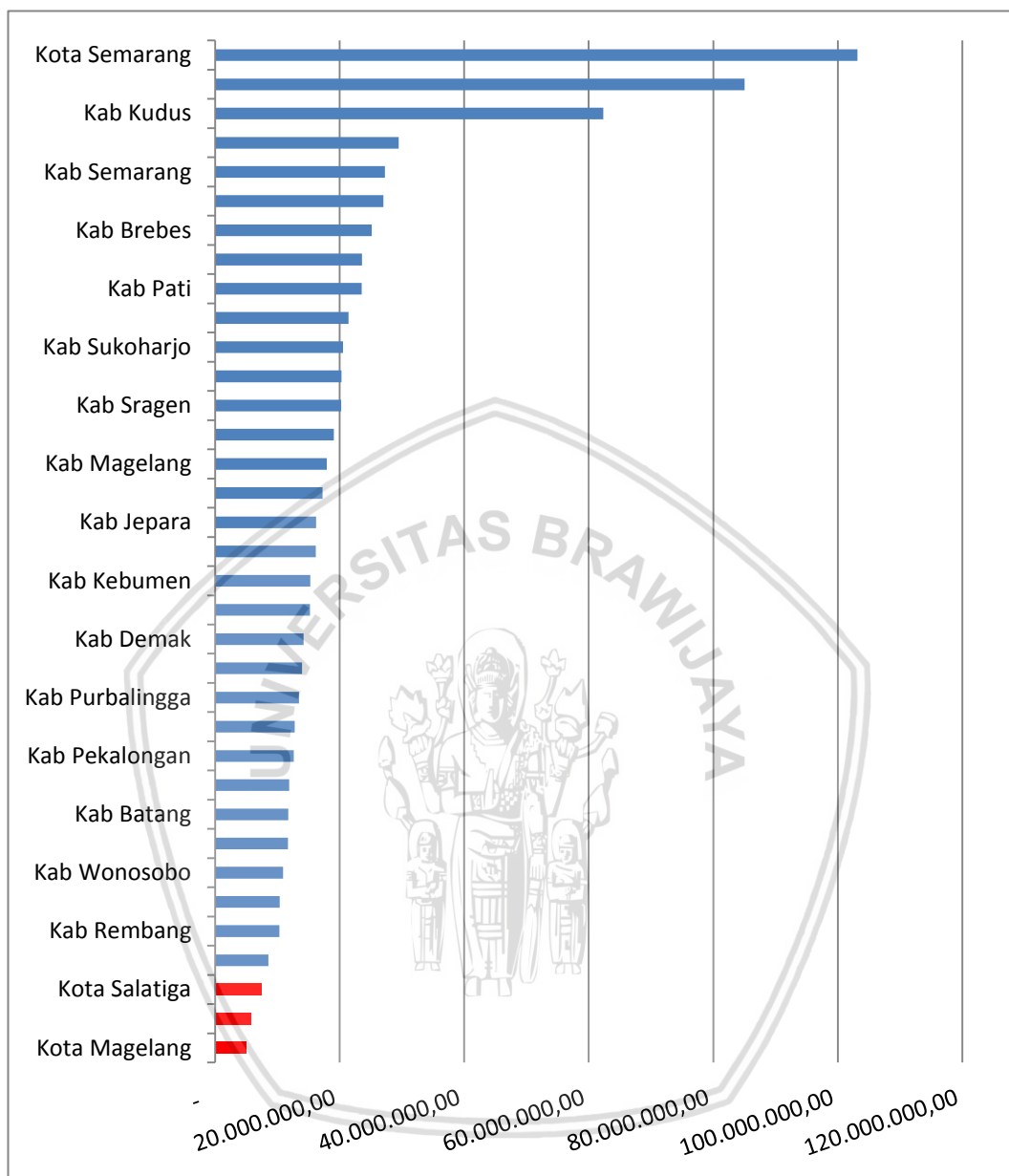
Dari data tabel 1.1 dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Provinsi DKI memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu sebesar 6,05%. Posisi kedua yaitu Provinsi Banten dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93%. Kemudian Provinsi

Jawa Timur diposisi ketiga dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,91%. Diposisi keempat yaitu provinsi Jawa Barat dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73%. Kemudian diposisi kelima yaitu provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%. Diposisi terakhir yaitu DIY dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,20%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berfluktuasi selama tahun 2012-2016. Hal tersebut juga terjadi di provinsi pulau Jawa lainnya yang cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Provinsi Jawa Tengah berada diposisi kelima yang merupakan provinsi kedua terendah dari 6 provinsi lainnya dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%. Provinsi Jawa Tengah dengan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki serta jumlah kabupaten/kota yang secara administratif dimiliki cukup besar yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota seharusnya dapat memaksimalkan keuntungan tersebut untuk bisa bersaing dengan provinsi lainnya. Untuk Perkembangan jumlah rata-rata PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1. 1 : Rata-Rata PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah 2018

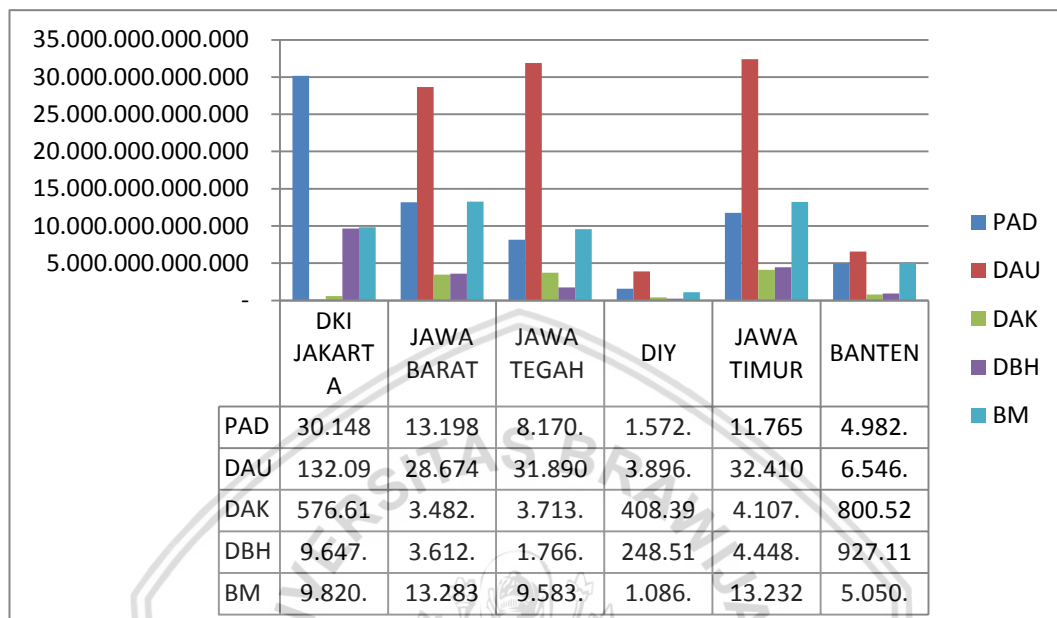
Dari Gambar 1.1 diketahui terdapat tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah PDRB tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Kudus dengan rata-rata sebesar Rp 62.343.117 (dalam juta), kemudian Kabupaten Cilacap dengan rata-rata sebesar

Rp 85.056.875 (dalam juta), dan nilai rata-rata terbesar ditempati oleh Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata sebesar Rp 103.152.832 (dalam juta). Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan rata-rata PDRB terendah yaitu ada Kota Salatiga dengan nilai rata-rata sebesar Rp 7.373,197(dalam juta)selanjutnya Kota Pekalongan dengan nilai rata-rata sebesar Rp 5.754.732 (dalam juta), dan daerah dengan nilai rata-rata terendah yaitu Kota Magelang dengan nilai rata-rata sebesar Rp 4.999.499 (dalam juta). Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah belum merata karena masih terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah dimana ada beberapa Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan yang tinggi sekali dan masih ada Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan yang amat kecil. Kesenjangan pembangunan antar daerah juga masih terjadi sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat maka setiap tahunnya seluruh pemerintah daerah di Indonesia diharuskan untuk meneyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya menunjukkan alokasi belanja untuk pelaksanaan program, sumber-sumber pendapatan, dan pembiayaan yang diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Di dalam APBD menunjukkan alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan sumber-sumber pendapatan dan juga pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Salah satu komponen andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kondusif adalah dengan belanja daerah.

Berikut grafik rata-rata Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal di enam Provinsi Pulau Jawa:

Gambar 1. 2 Rata-rata PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal 6 Provinsi Pulau Jawa

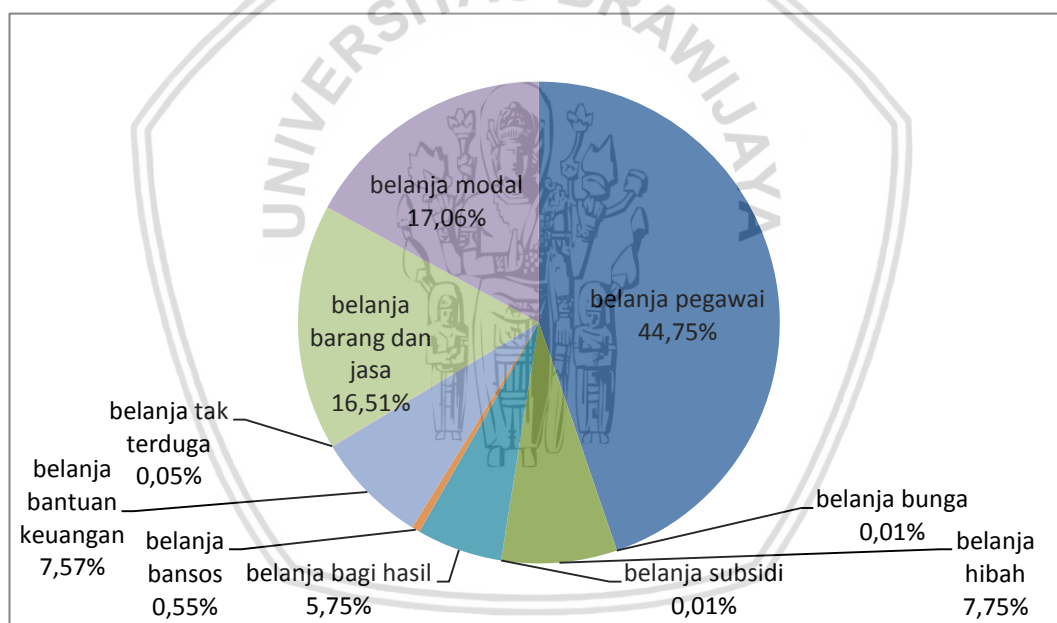


Sumber: DJPK KEMENKEU, data diolah 2018

Dari grafik 1.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dan terendah yaitu Provinsi DIY, sedangkan Provinsi Jawa Tengah berada di urutan keempat dari enam provinsi. Untuk rata-rata DAU dan DAK tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur dan terendah Provinsi DIY, sementara rata-rata DAU Provinsi Jawa Tengah berada di urutan kedua dari enam provinsi lainnya di pulau Jawa. Untuk rata-rata penerimaan DBH tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan terendah yaitu Provinsi DIY, sedangkan Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan keempat dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa. Terakhir untuk rata-rata belanja modal yang dilakukan oleh keenam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa belanja modal tertinggi dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dan yang terendah yaitu Provinsi DIY, sementara itu Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan keempat dari enam provinsi yang ada di pulau Jawa.

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan. Berikut komposisi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016:

Gambar 1. 3 : Grafik Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



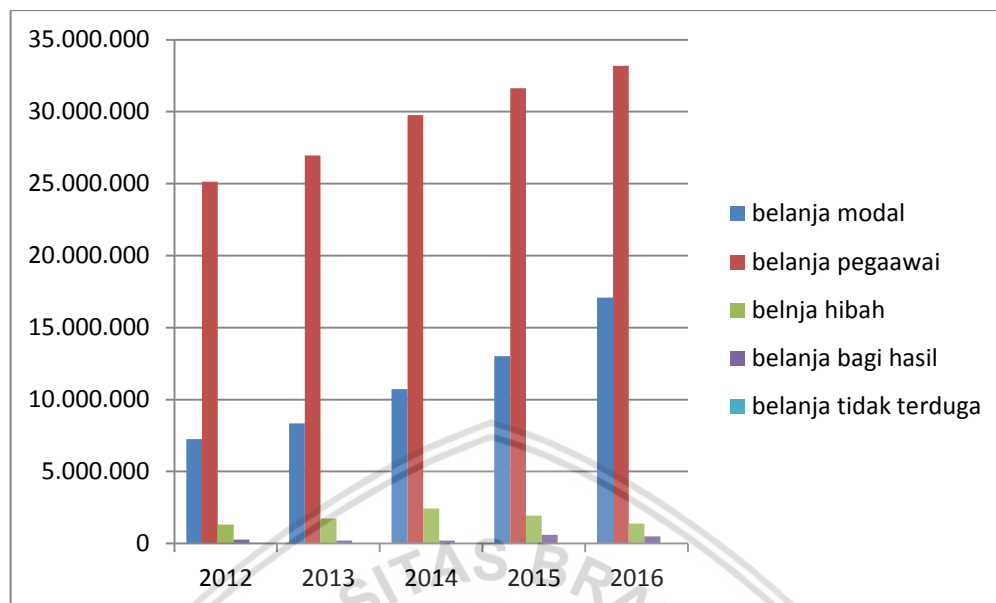
Sumber: DJPK KEMENKEU, data diolah 2018

Belanja pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dari belanja modal dan belanja barang dan jasa selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Semakin besarnya porsi belanja modal dan belanja barang dan jasa maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Namun dari gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa alokasi belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk belanja modal pembangunan.

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk membangun aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang. Alokasi belanja modal di dasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik. Belanja modal pemerintah daerah bertujuan untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Jika suatu daerah memiliki sarana dan prasana yang memadai maka akan menarik minat investor untuk melakukan investasi dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehingga tingkat produktivitas akan meningkat yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka penerimaan daerah berupa PAD dan dana perimbangan ini seharusnya lebih diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan publik sehingga diharapkan nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Meskipun porsi belanja modal lebih sedikit dari belanja pegawai, kenyataannya setiap tahun belanja modal selalu mengalami peningkatan. Berikut alokasi belanja Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah dalam juta rupiah tahun 2012-2016:

Gambar 1. 4 : Rata-Rata Belanja Pegawai, belanja modal, belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 2018

Dari Grafik 1.4 menunjukkan bahwa setiap tahunnya belanja di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. peningkatan tertinggi berada pada belanja pegawai. Belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatan ini tidak sebesar peningkatan belanja pegawai. Namun jika dibandingkan dengan belanja lainnya peningkatan belanja modal ini termasuk cukup tinggi. Peningkatan belanja modal dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Peningkatan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (%)

Tahun	Belanja modal	Presentase peningkatan belanja modal
2011	4,656,181,262,525	-
2012	6,610,530,960,834	41.97
2013	7,352,707,038,276	11.23
2014	9,143,943,848,393	24.36
2015	10,505,296,865,265	12.96
2016	14,280,950,376,411	26.49

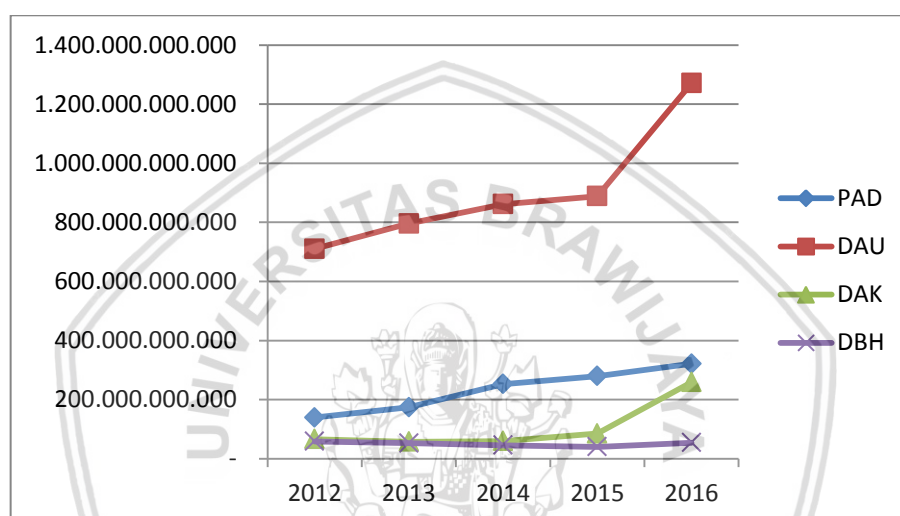
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 2018

Sumber pendanaan untuk alokasi belanja daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah memiliki hubungan positif dengan pengeluaran pemerintah. Ketika pendapatan meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat dikarenakan pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk membiayai belanja daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Liliana et. al (2011) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan pengeluaran pemerintah. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah. Penelitian lain dari Ogujiuba dan Abraham (2012) yang dilakukan di Nigeria yang hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan dan pengeluaran memiliki korelasi yang kuat.

Pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan untuk alokasi belanja daerah dalam menyediakan berbagai fasilitas publik. PAD yang merupakan sumber penerimaan utama daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dan merupakan sumber utama yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Selain dari PAD, komponen penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan yang berupa DAU, DAK, dan DBH. Menurut

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tujuan dari alokasi dana perimbangan kepada daerah yaitu untuk membiayai kebutuhan daerah yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut rata-rata perkembangan dari PAD dan dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah:

Gambar 1. 5 Rata-Rata Perkembangan PAD, DAU, DAK, dan DBH Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah 2018

Dari Gambar 1.5 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber utama untuk membiayai belanja daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebesar peningkatan DAU yang diberi oleh pemerintah pusat. Dana perimbangan dari pemerintah pusat lainnya berupa DAK dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan, namun setelah itu mengalami peningkatan sampai pada tahun 2016. Sedangkan DBH mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami penurunan, dan baru pada tahun 2016 DBH kembali mengalami peningkatan.

Penelitian oleh Maryati dan Endarwati (2010) tentang pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus pada Provinsi Sumatera Barat menunjukkan ketiganya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain dilakukan oleh Santoso (2013) hasilnya menunjukkan bahwa DAK dan DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat penelitian lain dengan model empiris yang sedikit berbeda karena memasukkan variabel belanja modal sebagai variabel independen bersama dengan pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Prasetya (2011) menyatakan bahwa PAD, DAU, DBH, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain dengan model empiris yang berbeda dengan menjadikan belanja modal sebagai variabel dependen dilakukan oleh Wandira (2013) yang berjudul pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap alokasi belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia hasilnya menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian dari Ningsasra (2016) mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian penganggaran belanja modal menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.

Penelitian ini didasari karena setiap tahunnya penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan dana perimbangan mengalami peningkatan yang akan mempengaruhi peningkatan pada pengeluaran daerah. Namun, pengeluaran masih didominasi oleh belanja pegawai daripada belanja modal. Meskipun belanja modal tidak sebesar belanja pegawai, penyerapan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan daerah dan belanja modal ini ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah masih mengalami fluktuasi. Maka dari itu peneliti ingin melihat sejauh mana pengaruh dari penerimaan daerah berupa PAD, DAU, DAK, dan DBH mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan diatas. Pada penelitian ini belanja modal digunakan sebagai variabel intervening antara PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan pertumbuhan ekonomi. Selain sebagai variabel independen untuk pertumbuhan ekonomi, belanja modal juga merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, dan DBH. Karena adanya sifat dualitas tersebut mengarahkan belanja modal pada sifat variabel intervening yaitu dapat dipengaruhi oleh variabel independen dan secara bersamaan mampu mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Belanja Modal (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”***. dengan adanya penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan evaluasi kinerja di Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul beberapa permasalahan diantaranya:

1. Apakah PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian penjelasan sebelumnya dan untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

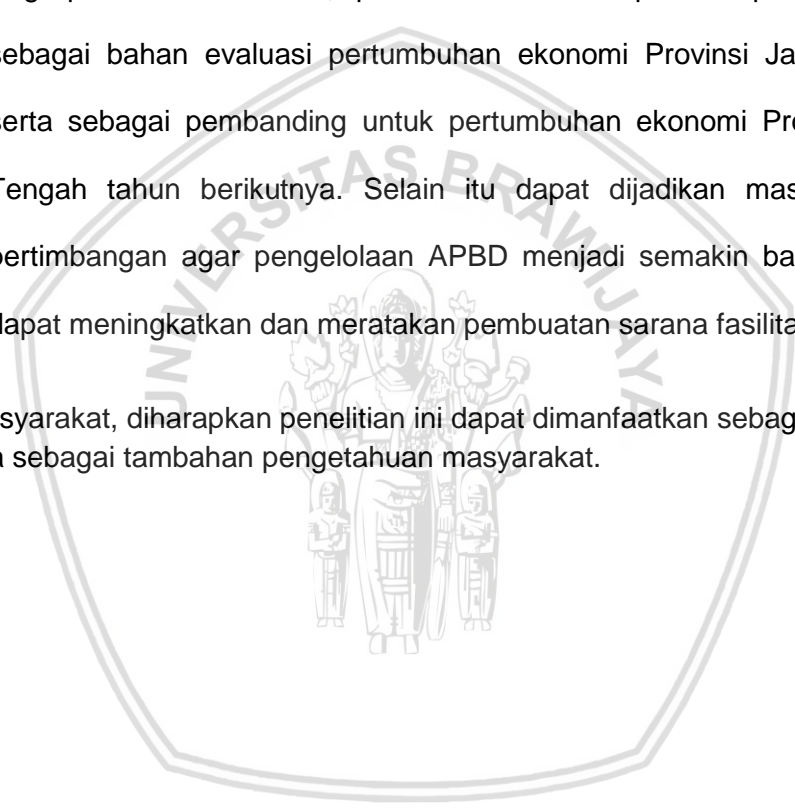
1. Untuk mengetahui pengaruh dari PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara konseptual maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah serta sebagai pembanding untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun berikutnya. Selain itu dapat dijadikan masukan serta pertimbangan agar pengelolaan APBD menjadi semakin baik sehingga dapat meningkatkan dan meratakan pembuatan sarana fasilitas publik.

Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan juga sebagai tambahan pengetahuan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Latin yaitu *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan. Otonomi dalam bahasa Yunani yaitu *Autonomos* atau *Autonomia* yang artinya “keputusan sendiri” (*self-rulling*). Otonomi daerah tidak bisa dipisahkan dari konsep desentralisasi karena otonomi daerah merupakan bagian dari konsep desentralisasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Muluk,MR dalam Imam Hanafi & Tri Laksono Mugroho(2009) bahwa: “cakupan istilah desentralisasi menunjukkan bahwa desentralisasi itu dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, desentralisasi mencakup konsep devolusi (desentralisasi dalam arti sempit), dekonsentrasi, dan delegasi yang mencakup pola privatisasi. Dalam khazanah sejarah Indonesia dikenal pula cakupan yang agak berbeda selain cakupan diatas, yaitu *medebewind* dan *vrij bestuur*.”

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Kaho dalam Imam Hanafi & Tri Laksono Mugroho(2009) Otonomi sebagai Peraturan sendiri dan pemerintah sendiri, sebagaimana yang dikemukakannya sebagai berikut: mula-mula otonomi atau berotonomi berarti

mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak atau kekuasaan atau kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Otonomi daerah seluas-luasnya mulai diberikan kepada daerah tepatnya kepada Kabupaten/Kota yang disertai dengan diserahkannya kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang mana nantinya akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional yang fokus kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Secara umum otonomi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Bratakusumah dalam Imam Hanafi & Tri Laksono Mugroho(2009):

1. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar.
2. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya.
3. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan dalam membiayai kegiatan rumah pemerintahannya.
4. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*), dan untuk memajukan perikonomian daerah. Untuk mencapai tujuan utama dari otonomi daerah tersebut terdapat tiga misi utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sedangkan tujuan otonomi daerah menurut Syarif Hidayat dalam Halim (2004) dalam Imam Hanafi & Tri Laksono Mugroho(2009) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dilihat dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan dari kepentingan pemerintah daerah terdapat tiga tujuan utama menurut Halim (2004) dalam Imam Hanafi & Tri Laksono Mugroho(2009) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat local dan daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi.

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa tujuan pemberian otonomi daerah yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin lebih baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi

antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 7 desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (pada fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan suatu alat atau instrument untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang lebih terbuka, efektif, responsif serta untuk meningkatkan sistem representasional dalam pengambilan keputusan di masyarakat (Domai, 2011). Desentralisasi sebagai alat dapat digunakan oleh pemerintah untuk dekat dengan masyarakat, untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa konsep desentralisasi fiskal menurut Machfud Sidik (2002) dalam Hanafi & Mugroho(2009) yaitu sebagai berikut:

1. Desentralisasi administratif (*Administrative decentralization*) merupakan pelimpahan wewenang yang bertujuan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik.
2. Desentralisasi politik (*Political decentralization*) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya masyarakat lokal dalam mengambil keputusan secara politis.

3. Desentralisasi ekonomi (*economic of market decentralization*) merujuk pada transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta yang artinya penguasaan yang sebelumnya diurus oleh pemerintah diberikan/disertakan kepada perusahaan swasta, kepentingan kelompok, organisasi dan bukan pemerintah lainnya.
4. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) adalah komponen utama desentralisasi, jika pemerintah daerah melakukan fungsinya dan diberi kebebasan dalam mengambil keputusan untuk pengeluaran disektor publik maka harus mendapat dukungan pemerintah pusat yang berupa subsidi, bantuan, ataupun pinjaman serta sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, desentralisasi fiskal adalah salah satu komponen utama otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Zulyanto (2010) desentralisasi fiskal memiliki beberapa prinsip dan tujuan diantaranya:

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional.

4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro

Inti dari pelaksanaan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Hal tersebut dikarenakan pemberian kewenangan di bidang politik administrasi dan ekonomi tanpa adanya desentralisasi fiskal maka akan sia-sia. Maka dari itu dengan adanya desentralisasi fiskal ini diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument utama kebijakan fiskal pemerintah daerah yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan daerah.

Pada era orde lama, menurut Wajong (1962) dalam Abdul Halim (2007) APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financieel werkplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga Daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai

kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran.

Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.” Dalam Kepmedagri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan pada pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Selanjutnya pemerintah daerah bersama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar untuk mengelola keuangan daerah dalam periode satu tahun anggaran. APBD menjadi pedoman penerimaan dan pengeluaran anggar oleh pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Halim (2007) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta urainnya secara rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Untuk bentuk dan susunan APBD telah mengalami dua kali perubahan pada era prareformasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 susunan APBD mula-mula terdiri atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Anggaran Rutin terdiri dari Pendapatan Rutin dan Belanja Rutin, sedangkan Anggaran Pembangunan terdiri dari Pendapatan Pembangunan dan Belanja Pembangunan. Kemudian dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baru pada tahun 1984-1988, maka susunan tersebut mengalami perubahan. Susunan APBD tidak hanya sekedar Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan namun terbagi menjadi Pendapatan dan Belanja. Dimana Pendapatan terbagi menjadi Pendapatan dari Daerah, Penerimaan Pembangunan, dan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP). Sedangkan Belanja dibagi menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja Rutin diklasifikasikan atas 10 bagian, dan Belanja Pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 sektor (termasuk didalamnya yaitu subsidi Kepada Daerah Bawahan, Pembayaran Kembali Pinjaman, dan UKP).

Perubahan kedua pada era prareformasi terjadi pada tahun 1998 yaitu pada bagian Pendapatan dari Daerah. Perubahan terjadi pada bentuk klasifikasinya. Jika dalam bentuk sebelumnya Pendapatan dari Daerah terbagi menjadi empat yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan sumbangan serta bantuan, maka

pada bentuk yang baru Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Sumbangan dan Bantuan menjadi satu bagian dengan nama Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi.

Klasifikasi APBD yang digunakan saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 22 ayat 1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode bersangkutan. Pendapatan merupakan segala jenis penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah ekuitas dana lancar yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran tersebut. Pendapatan daerah ini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini nantinya yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

- b. Dana Perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Dana perimbangan tersebut berasal dari dana Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan menjadi instrument kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal baik secara vertikal yang disebabkan karena kapasitas fiskal yang dimiliki seluruh pemerintah daerah tidak dapat untuk mencukupi untuk mendanai kebutuhan belanja daerah maupun ketimpangan secara horizontal yang disebabkan ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah, dimana kapasitas fiskal setiap daerah berbeda-beda karena adanya perbedaan kondisi perekonomian antar daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:
- i. Hibah dapat berasal dari pemerintah daerah lainnya, dari kelompok masyarakat atau perorangan, dari badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, dan juga lembaga luar negeri yang tidak mengikat
 - ii. Dana darurat yang berasal dari pemerintah dalam rangka untuk penanggulangan kerusakan/korban akibat dari bencana alam
 - iii. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota

- iv. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang diterapkan oleh pemerintah
 - v. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.
2. Belanja daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 belanja daerah adalah suatu kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi jumlah ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang mana tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 31 ayat 1 menerangkan bahwa belanja daerah digunakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 13 ayat 1 memberikan gambaran klasifikasi belanja daerah secara rinci berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, maupun klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib menjadi prioritas karena bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai bentuk dari upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang baik dan layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Jadi yang dimaksud dengan belanja daerah yaitu meliputi seluruh pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dapat mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

3. Pembiayaan daerah adalah keseluruhan transaksi keuangan pemerintah, baik berupa penerimaan ataupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran untuk investasi atau penyertaan modal serta untuk dana cadangan. Di dalam struktur pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Jadi pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Tujuan dari disediakannya pembiayaan ini untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan ataupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang

berasal daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam upaya meningkatkan PAD daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Halim (2012), sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. terdapat dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi (terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air di bawah tanah, dan pajak air permukaan) dan pajak kabupaten/kota (terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir).

Retribusi daerah adalah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan jasa-jasa negara. Artinya retribusi daerah merupakan pembayaran karena telah memakai jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang telah diberikan oleh daerah. Maka setiap pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah senantiasa berdasarkan pada prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Menurut Halim (2012) jenis pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan ada tiga yaitu bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis-jenis penerimaan ini meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, jasa giro, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5 Belanja Modal

Menurut Abdul Halim (2007) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah

belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53 belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Peningkatan belanja yang terjadi pada sebuah sistem perekonomian akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan, sehingga nantinya akan mendorong peningkatan belanja dan pendapatan dari masyarakat. Terdapat beberapa kriteria dari belanja modal yaitu:

1. Pengeluaran bersifat tetap, menambah masa umur dan masih dalam kapasitas yang relatif tinggi
2. Pengeluaran melebihi batas minimum kapasitas set tetap suatu pemerintahan
3. Niat dari pembelanjaan tidak untuk dibagikan

Terdapat beberapa kategori belanja modal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah merupakan pengeluaran biaya untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai pada saat tanah yang dimaksudkan dalam kondisi siap untuk dipakai.
2. Belanja modal gedung dan bangunan meliputi pengeluaran/biaya untuk pengadaan/penggantian/penambahan, dan termasuk pula pengeluaran

untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap untuk dipakai.

3. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya untuk pengadaan/penambahan/penggantian, peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi meliputi pengeluaran/biaya untuk pengadaan/pembuatan serta perawatan/peningkatan pembangunan dan termasuk juga pengeluaran yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap untuk dipakai.
5. Belanja modal fisik lainnya meliputi pengeluaran/biaya untuk pengadaan/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan terhadap fisik lainnya yang tidak termasuk dalam keempat kategori sebelumnya. Belanja modal fisik diantaranya belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang untuk museum, barang purbakala, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Sedangkan menurut Halim (2002) belanja modal dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Contohnya: pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
2. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat, tapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Contohnya: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

Belanja modal diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

2.6 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan definisi dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Widjaja (2002) Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan disebut juga dana transfer atau *grants*. Dana perimbangan/transfer/*Grant* ada karena konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan transfer yaitu untuk mengurangi kesenjangan keuangan secara horizontal antar daerah dan mengurangi kesenjangan keuangan vertikal antara pusat dan daerah, mengatasi persoalan kesenjangan efek pelayanan publik antar daerah, dan menciptakan

stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Menurut Elmi (2002) dalam Fani Wiraswasta (2017) tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai wujud tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian “kue nasional” , baik vertikal maupun horizontal.
2. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan Negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dana perimbangan memiliki tiga komponen didalamnya yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum.

2.6.1 Dana Alokasi Umum

Salah satu transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari APBN yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada seluruh Kabupaten/Kota yang tujuannya untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dibandingkan dengan daerah kaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara definisi menurut Sidik (2003) Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut:

1. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.
2. Instrument untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralkan ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.

Pendistribusian Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan pada formula baku yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tujuan dari formulasi DAU tersebut adalah untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan dari setiap daerahnya. Daerah dengan kemampuan yang baik akan mendapatkan DAU dalam porsi yang sedikit, dibandingkan daerah dengan kemampuan yang buruk. DAU sebagai salah satu komponen Dana Perimbangan, dialokasikan berdasarkan perhitungan konsep alokasi dasar dan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Fiskal gap suatu daerah yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF) daerah tersebut. Berikut formulasinya:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan:

AD : gaji PNS di Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Kebutuhan fiskal di pengaruhi oleh variabel jumlah penduduk, total area, kondisi geografis dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan kemampuan fiskal diukur dengan PDRB, potensi industri, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.

2.6.2 Dana Bagi Hasil

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil menjelaskan bahwa:

1. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH)
3. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu sebesar 80% menjadi hak pusat, dan 20 % menjadi bagian daerah dengan rincian 8% bagian provinsi dan 12% bagian kabupaten. Hal tersebut senada dengan isi dari PP Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPH, baik itu PPH pasal 21 atau pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing 20% dari penerimaannya, yang mana 20% bagian daerah tersebut terdiri dari 8% bagian provinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Sedangkan untuk bagian daerah dari PBB diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2000, dimana daerah

menerima bagian sebesar 90% dan sisanya sebesar 10% menjadi bagian dari pemerintah pusat yang merupakan upah pungut. Bagian daerah dari penerimaan BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dimana bagian pemerintah pusat hanya sebesar 20% dan sisanya dikembalikan kembali ke daerah.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juga mengatur besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi sebesar 15% dan gas alam sebesar 30% dari penerimaan bersih setelah dikurangi dengan komponen pajak dan biaya-biaya lainnya yang menjadi faktor pengurang. Namun karena adanya pemberlakuan otonomi khusus untuk provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan untuk Provinsi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bagian dari kedua daerah tersebut berbeda dari daerah lainnya, yang mana untuk penerimaan migas bagian nya ditetapkan sebesar 70% sedangkan untuk penerimaan dari SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan bagian kedua daerah tersebut sebesar 80%.

2.6.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas ke pemerintah dibidang

tertentu khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Jadi Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK merupakan dana yang bersifat khusus (*specific grant*) yang mana penggunaannya berdasarkan petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi, dalam hal ini yaitu pemerintah pusat.

Tujuan khusus pemberian DAK untuk daerah khusus yang terpilih yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai .
4. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh daerah calon penerima DAK. Hal tersebut diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa daerah calon penerima DAK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang mencerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan belanja PNS daerah.

2. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dengan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis dirumuskan oleh menteri teknis terkait dalam bentuk indikator-indikator khusus yang akan didanai dari DAK. Kegiatan yang didanai DAK yang dimaksud adalah kegiatan yang sifatnya kegiatan fisik, maka daerah penerima DAK diwajibkan untuk menganggurkan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang diterima.

Selain itu daerah yang ingin memperoleh DAK harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerahnya kurang mampu untuk membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan.
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait.

2.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno (1994) dalam Azzumar (2011) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang biasanya digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi juga bisa dikatakan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian dari suatu Negara secara bertahap menuju ke keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk menganalisis mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu Negara atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan dalam segi pembangunan ekonomi. Untuk menilai pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan tiga macam ukuran yaitu pertumbuhan output untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di suatu wilayah, pertumbuhan output per pekerja sebagai indikator adanya perubahan daya saing suatu wilayah (melalui pertumbuhan produktivitas, dan pertumbuhan output per kapita sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Todaro (2003) dalam Azzumar (2011) terdapat tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

2.7.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik mulai berkembang sekitar abad ke-18. teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Buku berjudul *The Wealth of Nation* karya Adam Smith pada tahun 1776 mengenai bagaimana perekonomian (kapitalis) tumbuh merupakan penanda bermulanya

era ekonomi klasik. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini mengasumsikan bahwa luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori ini menjelaskan keterkaitan pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk yang disebut juga dengan teori penduduk optimal. Menurut teori penduduk optimal awalnya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Pertambahan jumlah penduduk secara terus menerus akan menyebabkan hukum hasil lebih yang semakin berkurang yang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan menurun dan menyebabkan pendapatan per kapita sama dengan produksi marginal. Pada keadaan tersebut pendapatan per kapita berada dalam nilai yang maksimal. Jumlah penduduk saat itu disebut penduduk optimal. Jika jumlah penduduk terus mengalami peningkatan sampai melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk tersebut akan menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi menurun.

2.7.2 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1939) di Inggris dan Evsey D. Domar (1946) di Amerika Serikat pada waktu yang hampir bersamaan. Proses perhitungan yang digunakan keduanya berbeda namun memberikan hasil yang sama sehingga mereka dianggap mengemukakan ide yang sama sehingga disebut dengan Teori Harrod-Domar. Teori ini berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi di Negara-negara maju. Investasi berperan penting dalam teori ini. Investasi berpengaruh ganda dalam jangka panjang yaitu satu sisi investasi mempengaruhi permintaan agregat dan disisi lain investasi mempengaruhi kapasitas produksi nasional dengan menambahkan stok modal yang tersedia. Menurut Harrod suatu ekonomi nasional akan mencapai pertumbuhan ekonomi

yang mantap (*steady-state growth*) maka efek permintaan dari penambahan investasi harus selalu diimbangi efek penawaran tanpa terkecuali. Namun investasi yang dilakukan oleh pengusaha dengan harapan yang tidak selalu sama tiap waktunya sehingga menyebabkan keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang yang mantap hanya akan tercapai jika pengharapan para pengusaha stabil dan kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil.

Teori Harrod-Domar juga menganalisis persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu negara agar perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang secara sempurna atau *steady growth* yang harus memenuhi syarat keseimbangan yaitu adanya kesamaan antara tingkat pertumbuhan modal dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja serta mencetuskan konsep pertumbuhan berimbang yang meliputi penjelasan tentang tingkat pertumbuhan alamiah jangka panjang. Teori Harrod-Domar menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung maka akan menambah *capital stock* sehingga nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Teori ini melengkapi teori Keynes yang melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan teori ini melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar memiliki beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian bersifat tertutup yang terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save/MPS*) konstan, begitupula rasio antara modal-output (*Capital Output-Ratio* atau

COR) dan rasio pertambahan modal-output(*Incremental Capital-Output Ratio* atau ICOR)

2.7.3 Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow (1969) dan T.W Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan beberapa unsur yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam Boediono (2012) kerangka umum model Solow-Swan mirip dengan model Harrod-Domar namun dari satu segi lebih luwes sebab model Solow-Swan menghindari masalah “ketidakstabilan” yang merupakan ciri *warranted rate of growth* dalam model Harrod-Domar dan bisa lebih luwes digunakan untuk menjelaskan masalah mengenai distribusi pendapatan. Model Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang lebih umum yang memungkinkan terjadinya substitusi antara kapital (K) dengan tenaga kerja (L). bentuk fungsi produksinya adalah:

$$Q = F (K,L)$$

Fungsi tersebut memungkinkan untuk berbagai kombinasi penggunaan K dan L untuk mendapatkan suatu tingkat output. Fungsi semacam itu (sering ditemukan pada teori mikro) disebut fungsi produksi neo klasik. Penggunaan fungsi produksi neo klasik tersebut menimbulkan satu konsekuensi lain yang penting. Konsekuensi tersebut adalah seluruh faktor produksi yang tersedia baik K ataupun L akan selalu digunakan secara penuh dalam proses produksi karena dengan fungsi produksi neo klasik berapapun K dan L yang tersedia dapat dikombinasikan untuk proses produksi sehingga tidak ada kemungkinan kelebihan atau kekurangan faktor produksi. Posisi *full employment* inilah yang

menjadi ciri utama yang membedakan model neo klasik dengan model pertumbuhan lainnya.

2.7.4 Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Teori pertumbuhan ini menekankan kepada peranan beberapa faktor tertentu yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan menganalisa ciri-ciri perubahan yang terjadi dalam setiap pembangunan masyarakat. Menurut Rostow pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari berbagai perubahan berikut:

1. Perubahan reorientasi organisasi ekonomi
2. Perubahan pandangan masyarakat
3. Perubahan cara menabung atau menanamkan modal dari yang tidak produktif ke yang lebih produktif
4. Perubahan pandangan terhadap faktor alam bahwa alam tidak menentukan kehidupan manusia akan tetapi kehidupan manusia harus mampu menaklukkan/mengendalikan kekayaan alam sehingga nantinya apa yang tersedia dapat menjadi sumber kehidupan untuk mencapai kemakmuran.

Menurut Rostow pertumbuhan ekonomi digolongkan menjadi lima yaitu:

1. *The traditional society* (masyarakat tradisional)
2. *The precondition for take off* (pramasyarakat untuk lepas landas)
3. *The take off* (lepas landas)
4. *The drive to maturity* (gerakan kearah kedewasaan)
5. *The age of high mass consumption* (masa konsumsi tinggi)

Analisis Rostow berdasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi tercipta akibat dari timbulnya perubahan yang bukan dari kegiatan ekonomi tapi dari keadaan politik dan hubungan social.

2.8 Teori Makro : Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Guritno (1994) Pengeluaran pemerintah menunjukkan kebijakan pemerintah tersebut, dimana jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, tertentu, pengeluaran pemerintah menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah maka akan semakin besar pula pengeluaran dari pemerintah bersangkutan. Pembahasan mengenai kegiatan ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Berikut teori yang mendukung:

2.8.1 Teori Adolf Wagner

Pada abad ke 19 Adolf Wagner melakukan pengamatan empiris terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap PDB.

Wagner menyatakan bahwa didalam suatu perekonomian jika pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam

masyarakat seperti hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan lain sebagainya.

2.9 Hubungan PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada era desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih oleh pemerintah pusat dalam mengelola keuangannya. Hal ini tercermin dengan adanya APBD di setiap daerah yang meliputi penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Pada kerangka pikir ini akan dijelaskan secara singkat mengenai variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah atau PAD (X1) dengan variabel pertumbuhan ekonomi/PDRB (Y2) adalah implementasi dari otonomi daerah yang mana daerah harus mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu penerimaan daerah yang dihasilkan oleh daerah sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah yang bukan dari dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat ke daerah dalam membiayai belanja dan pendapatan atau rumah tangga daerah tersebut. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Daerah akan lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. PAD sebagai sumber pendapatan diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat sebagai respon atas kebutuhan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara makro akan meningkatkan jumlah output barang dan/atau jasa daerah bersangkutan yang akan diikuti dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang pada saatnya akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Rizky Azzumar dan Dra. Herniwati Retno Handayani, MS. (2011) menunjukkan hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan semakin tingginya PAD, maka akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Karena pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah.

Hubungan variabel DAU (X_2) dengan variabel pertumbuhan ekonomi/PDRB (Y_2) adalah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, DAU berperan penting untuk mendukung penyelenggaraan tersebut. Diterapkannya desentralisasi fiskal membuat daerah harus mampu untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Modal dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut seharusnya berasal dari PAD. Namun pada kenyataannya PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2004 dalam Santoso, 2013). Maka untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU). DAU diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (belanja daerah) yang nantinya diharapkan akan memunculkan pelaku-pelaku ekonomi baru dalam masyarakat sebagai respon atas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meningkatnya aktivitas ekonomi di masyarakat secara makro menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa daerah bersangkutan yang akan diikuti dengan peningkatan jumlah uang beredar akibat belanja pemerintah daerah yang nantinya akan meningkatkan nilai PDRB dan kesejahteraan

masyarakat. Hasil penelitian Maryati dan Endrawati (2010) menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh signifikan karena belanja daerah didominasi dari jumlah DAU. DAU yang diterima pemerintah daerah dialokasikan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya untuk belanja modal.

DAK (X3) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. DAK cenderung dialokasikan untuk menambah aset tetap pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Anwar (2011) meski alokasi DAK tidak sebesar DAU tapi DAK (X3) digunakan untuk kegiatan bersifat fisik sehingga diperkirakan dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2). Fokus alokasi untuk belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur akan menjadi modal dasar masyarakat daerah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarah pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2013) menunjukkan hasil bahwa DAK dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan penjelasan bahwa alokasi DAK lebih digunakan untuk investasi pembangunan berupa sarana fisik penunjang yang berguna bagi publik.

DBH merupakan salah satu instrumen dari fiskal dari dana perimbangan yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan dan investasi daerah. DBH (X4) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah selain dari PAD, DAU, dan DAK. Menurut Santoso (2013), peningkatan dana perimbangan, maka kontribusi belanja pembangunan akan

menarik investor untuk berinvestasi di daerah yang nantinya akan memperluas basis kegiatan ekonomi di berbagai sektor yang mengarah pada peningkatan PDRB (Y2). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taaha *et all.* (2009) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Besar dan kecilnya DBH yang dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada investasi swasta yang nantinya akan menciptakan kesempatan kerja dan menciptakan *multiple effect* sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

PAD (X1) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan juga merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD (X1) meningkat maka dana dana milik pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat. Sehingga daerah dapat membiayai kewajibannya dalam menjalankan pemerintahan, termasuk untuk meningkatkan infrastruktur daerah yang dianggarkan dalam belanja modal (Y1). Menurut Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013 semakin baik PAD suatu daerah maka akan semakin besar alokasi belanja modalnya. Hasil penelitian dari Kartika dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. PAD yang tinggi berpengaruh terhadap pembangunan dan perkembangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana untuk kepentingan publik, sehingga akan meningkatkan alokasi belanja modal.

Hubungan DAU (X2) terhadap Belanja Modal (Y1), DAU merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. DAU diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah karena penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal tersebut sesuai dengan

penemuan dari Kuncoro, 2004 dalam Santoso, 2013 bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Dengan adanya dana transfer berupa DAU diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik maksimal yang direalisasikan melalui belanja modal. Hasil penelitian widiasih dan Gayatri (2017) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah karena DAU merupakan sumber utama pembiayaan bagi daerah untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di daerahnya sebagai akibat tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah.

Hubungan DAK (X3) dan Belanja Modal (Y1), DAK digunakan untuk investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk juga untuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal dan tidak untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, perjalanan dinas dan kegiatan umum lainnya. DAK hanya diperuntukkan dalam bentuk belanja modal. Penelitian dari Wandira (2013) menyatakan bahwa hubungan antara DAK dan belanja modal adalah positif signifikan karena dana transfer dari pemerintah pusat menuntut daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional dan juga membangun infrastruktur berkelanjutan yang salah satunya dengan pengalokasian anggaran sektor belanja modal.

Hubungan DBH terhadap belanja modal, DBH merupakan salah satu pendapatan potensial selain PAD, DAU, dan DAK yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Jika DBH besar maka pemerintah daerah dapat menetapkan alokasi belanja modal yang besar pula. Hal ini sama dengan studi

Holzt-Eakin *et all.* (1994) dan Gamkhar & Oates (1996) dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources*. Menurut hasil penelitian Wandira (2013) DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Provinsi dengan realisasi DBH besar cenderung memiliki belanja modal yang besar.

Pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran dalam alokasi belanja modal berdasarkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan juga untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Dengan adanya peningkatan belanja modal diharapkan dapat menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian oleh belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang nantinya akan menimbulkan investasi baru di daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

PAD yang tinggi berpengaruh terhadap pembangunan dan perkembangan suatu daerah yang direalisasikan dengan pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana untuk kepentingan publik, sehingga akan meningkatkan alokasi belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2014) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara variabel PAD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Artinya semakin tinggi PAD untuk belanja modal maka semakin tinggi kegiatan pembangunan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan agenda penting dari otonomi daerah yang dicapai pemerintah daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah. Namun, peningkatan pendapatan daerah ini tidak langsung diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan anggaran belanja yang efektif dan efisien yang berupa kegiatan-kegiatan produktif yang mengarah pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya dengan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome). Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan anggaran meliputi indikator input, output, dan outcome. Dalam penelitian ini DAU (X2), DAK (X3), dan DBH (X4) merupakan input, outputnya adalah belanja pemerintah (belanja modal, dan outcomenya adalah Pertumbuhan ekonomi. Outcome akan tercapai ketika output juga tercapai, yang artinya pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika output berupa belanja pemerintah (belanja modal) tercapai. Penelitian oleh Maryati dan Endarwati (2010) tentang pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus pada Provinsi Sumatera Barat menunjukkan ketiganya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Santoso (2013) menyatakan bahwa DAK dan DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat penelitian lain dengan model empiris yang sedikit berbeda karena memasukkan variabel belanja modal sebagai variabel independen bersama dengan pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Prasetya (2011) menyatakan bahwa PAD, DAU, DBH, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain dengan model empiris yang berbeda dengan menjadikan belanja modal sebagai variabel independen dilakukan oleh Wandira (2013) yang berjudul pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap alokasi belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia hasilnya menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian dari Ningsasra (2016) mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian penganggaran belanja modal menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa belanja modal mampu bersama-sama dengan variabel pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, disaat bersamaan belanja daerah juga dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah. Sehingga diduga variabel belanja modal memiliki sifat sebagai variabel intervening.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Peneliti	Variable penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat</p> <p>Ulfi Maryati, SE. M.Ak. Ak Endrawati, SE., M.Kom. Ak (2010)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>analisis deskriptif dan analisis regresi berganda</p>	<p>PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
2.	<p>Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali)</p> <p>Lukman Hakim (2014)</p>	<p>Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jala, irigasi, dan jaringan, belanja modal lainnya, dan PDRB.</p>	<p>Regresi data panel</p>	<p>Peningkatan belanja modal pemerintah (belanja modal tanah, peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja pemerintah (belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan) tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi</p>

No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia</p> <p>Budi Santoso</p> <p>(2013)</p>	<p>PAD, Dana Perimbangan (DAU,DAK,DBH), pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan.</p>	<p>Analisis jalur (<i>path analysis</i>)</p>	<p>PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah, namun DAK dan DBH tidak berpengaruh.</p> <p>PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh.</p> <p>Secara tidak langsung PAD, DAU,DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran maupun kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.</p>

No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil penelitian
4.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Ni Made Nopiani, Wayan Cipta, Fridayana Yudiaatmaja (2016)</p>	<p>Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Analisis jalur (<i>path analysis</i>)</p>	<p>PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kab.</p> <p>Buleleng, PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal</p>
5.	<p>Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kab/Kota Prov. Jawa Tengah)</p> <p>Mochamad Rizky Azzumar dan Dra. Herniwati Retno Handayani, MS. (2011)</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi swasta, tenaga kerja.</p>	<p>Model regresi linier berganda (<i>Multiple Linier Regression Method</i>) dengan metode kuadrat terkecil atau <i>Ordinary Least Square</i></p>	<p>Variable pendapatan asli daerah dan tenaga kerja secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>Sedangkan dana perimbangan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</p>
6.	<p>Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p> <p>Yanggi Ningsasra (2016)</p>	<p>PAD, Dana Alokasi Umum, dan pengalokasian anggaran belanja modal</p>	<p>Analisis regresi data panel</p>	<p>PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.</p>

No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Ni Nyoman Widiasih dan Gayatri (2017)	PAD, DAU, DBH, dan Belanja modal	Analisis regresi linier berganda	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
8.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh)	PAD, DAU, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal, tapi berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
9.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra.(2017)	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, pertumbuhan ekonomi.	Regresi linier berganda	pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

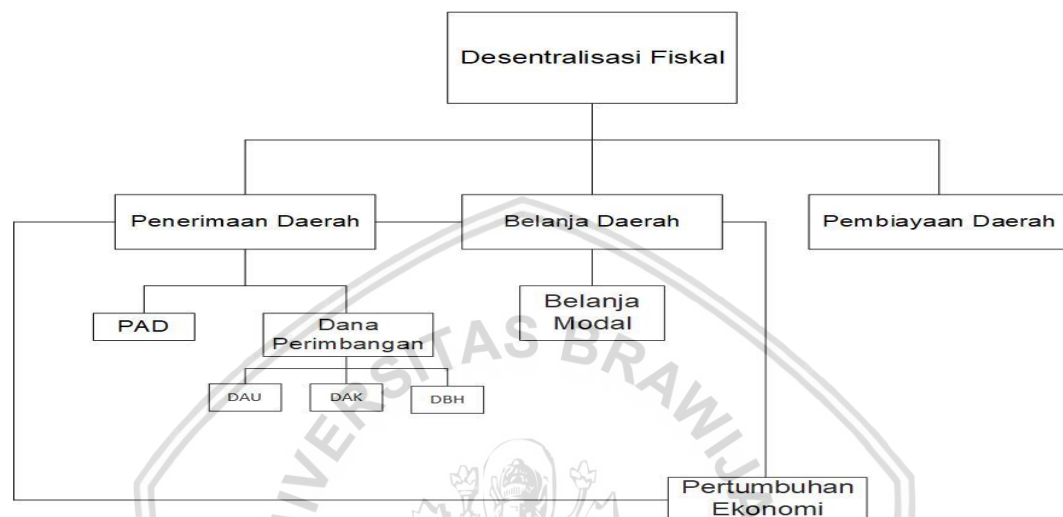
No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hail Penelitian
10.	<p>Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Provinsi Bali.</p> <p>Ni Komang Ayuk Sumartini dan I. G. W. Murjana Yasa.</p> <p>(2015)</p>	PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal	Analisis jalur/ <i>path analysis</i>	<p>PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.</p>

Sumber: data penulis, 2018

2.11 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Gambar 2. 1: Kerangka Pikir

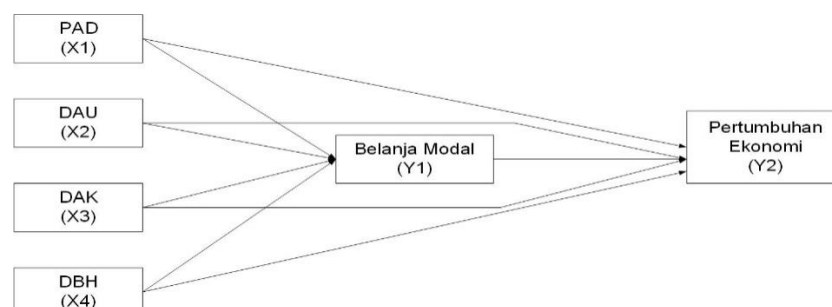


Sumber, Penulis 2018

2.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari data, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya maka hipotesis dapat digambarkan seperti diagram berikut ini:

Gambar 2. 2: Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis, 2018

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal.
- H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.
- H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal.
- H₄ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal.
- H₅ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₆ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₇ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₈ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₉ : Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
- H₁₀ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.
- H₁₁ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.
- H₁₂ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.
- H₁₃ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan kemudian menjelaskan hasil dari perhitungan tersebut.

Alasan yang melatarbelakangi penulis memilih jenis penelitian ini karena untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan dan dibahas pada bab sebelumnya. Melalui uji hipotesis tersebut diharapkan akan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variable bebas dan variable terikat.

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan berupa DAU, DAK, dan DBH, terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja modal di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016). Pengolahan data menggunakan alat bantu *software/aplikasi e-views 9*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Menurut Kuncoro, 2007 dalam Noer, 2012 data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross section. Data panel yang digunakan pada penelitian ini adalah

data panel selama 5 tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Karena adanya faktor ketersediaan dan kelengkapan data, maka penelitian ini menggunakan dasar jumlah kabupaten/kota sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian berupa realisasi PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja modal diambil dari laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melalui internet. Sedangkan untuk data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaknai sebagai sebuah petunjuk yang menjelaskan kepada peneliti mengenai bagaimana mengukur sebuah variable secara kongkret (Martono, 2016). Definisi operasional berguna untuk memudahkan pemahaman mengenai variabel yang diteliti, maka dari itu diperlukan penegasan dan penjelasan mengenai definisi operasional variabel. Dengan adanya definisi operasional maka akan memudahkan peneliti menentukan metode untuk mengukur sebuah variabel dan menentukan indikator yang lebih kongkret sehingga akan lebih mudah untuk diukur dan diuji secara empiris. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variable independen, dan variabel intervening. Variabel dependen merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (Martono, 2016). Variabel

independen (variabel bebas) merupakan suatu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain (Martono, 2016). Variabel intervening adalah variabel antara mediating yang berfungsi sebagai penghubung variabel independen dan dependen. Berikut penjelasan variabel yang digunakan pada penelitian ini:

1. **Pendapatan Asli Daerah (X1)**, yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Data yang digunakan yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian (Rp Miliar).
2. **Dana Alokasi Umum/DAU (X2)**, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Data yang digunakan yaitu realisasi dana alokasi umum (DAU) dari Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian (Rp miliar).
3. **Dana Alokasi Khusus/DAK (X3)**, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Data yang digunakan yaitu realisasi dana alokasi khusus (DAK) dari Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian (Rp miliar).
4. **Dana Bagi Hasil/DBH (X4)**, merupakan suatu dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya meliputi penerimaan pajak dan

penerimaan sumber daya alam. Data yang digunakan yaitu realisasidana bagi hasil Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian (Rp Miliar).

5. **Belanja Modal (Y1)**, yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode anggaran. Data yang digunakan yaitu realisasi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian (Rp Miliar).
6. **Pertumbuhan ekonomi (Y2)**, yaitu perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian (Rp Triliun).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono,2016). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan daerah yang telah diunduh (*download*) dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistika (BPS).

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang jumlah keseluruhannya sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini tidak dilakukan metode sampling dengan harapan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih menggambarkan kondisi riil yang ada.

3.6 Metode Analisis

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel, dimana data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Menurut Wibisono (2005) dalam Ajija, dkk. (2011) data panel memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu..
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang, sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom- df*), sehingga diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dari keunggulan-keunggulan data panel yang telah disebutkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada model data panel tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik (Verbeek, 2000; Gujarati, 2003; Aulia, 2004; Wibisono, 2005 Dalam Kurnia 2013) (Gujarati, 2004).

3.6.1 Pemilihan Model Estimasi

Terdapat tiga teknik dalam mengestimasi data panel, yaitu:

1. Pooled Least Square

Model ini menggambarkan data *cross section* dan *time series* dan dalam mengestimasi model panel data menggunakan metode OLS. Model ini merupakan model yang paling sederhana jika dibandingkan dengan model lainnya. Persamaan model common effect dijelaskan dimana i menunjukkan subjek (*cross section*) dan t menunjukkan periode waktu.

2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)

Pendekatan FEM memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted-variables* yang mungkin saja menyebabkan perubahan pada intersep *time series* atau *cross section*. FEM menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan adanya perubahan intersep ini.

3. Pendekatan efek random (random effect)

Pada pendekatan ini disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan random random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (kuncoro 2012 dalam putra 2017). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residualnya diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Untuk menggunakan model random effect ini harus memenuhi syarat yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variable penelitian.

3.6.2 Pemilihan Metode Estimasi

Dalam menentukan teknik estimasi yang tepat pada data panel tersebut maka dapat dilakukan dengan pengujian modal sebagai berikut:

1. Uji Chow

Dalam pengujian data panel untuk mengetahui model yang lebih baik dapat dilakukan dengan menambahkan variabel dummy sehingga nantinya dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji statistik F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model apakah yang lebih baik antara *fixed effect* atau *pooled least square*. Pada uji ini hipotesis nul adalah jika intercept sama , maka model yang tepat untuk regresi data panel adalah *pooled least square*. Untuk hipotesis alternatifnya adalah intercept tidak sama, maka model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed effect*. Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan program eviws. Hipotesis dalam uji Chow adalah sebagai berikut:

H0: Pilih *Pooled Least Square*

H1: Pilih *Fixed Effect Model*

2. Uji Hausman

Uji ini berguna untuk memilih apakah model fixed effect dan random effect lebih baik daripada common effect. Uji ini berdasarkan pada ide bahwa Least Squares Dummy Variables (LSDV) pada metode fixed effect dan Generalized Least Squares (GLS) pada metode Random effect adalah efisien sedangkan Ordinary Least Squares (OLS) pada metode Common effect tidak efisien. Maka dari itu uji hipotesis nul adalah hasil estimasi dari keduanya tidak berbeda sehingga uji hausman dapat dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Hipotesis dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

H0: Pilih *Random Effect Model*

H1: Pilih *Fixed Effect Model*

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM Test) berguna untuk memilih apakah model *Random Effect Model* (REM) lebih baik daripada model *Pooled Least Square* (PLS). Hipotesis dalam uji Lagrange Multiplier (LM Test) adalah sebagai berikut:

H0 : Pilih *Pooled Least Square* (PLS)

H1 : Pilih *Random Effect Model* (REM)

3.6.3 Analisis Path

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Menurut Riduwan dan Kuncoro (2008) dalam Sarjono dan Julianita

(2011), analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menganalisis pola hubungan di antara variabel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung ataupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menurut riduwan dan Kuncoro (2011) dalam Wiraswasta (2017) terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam *path analysis* yaitu:

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural.

Perumusan hipotesis telah dilakukan sebelumnya, tahap selanjutnya membuat persamaan struktural beserta diagram jalurnya. Persamaan struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{1it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_1$$

$$Y_{2it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 Y_{1it} + \varepsilon_2$$

Keterangan:

Y_{1it} : Belanja Modal

Y_{2it} : Pertumbuhan Ekonomi

α : Intercept/Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: koefisien regresi masing-masing dari variabel

X_{1it} : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_{2it} : Dana Alokasi Umum

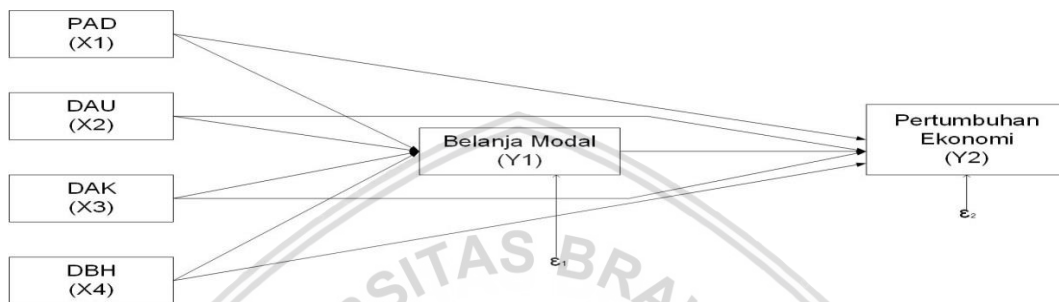
X_{3it} : Dana Alokasi Khusus

X_{4it} : Dana Bagi Hasil

$\varepsilon_1 \varepsilon_2$: Error term

2. Menghitung koefisien jalur berdasarkan koefisien regresi.
 - a. Gambaran diagram jalur lengkap, menentukan sub-sub strukturalnya yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Berikut model diagram jalur dalam penelitian ini:

Gambar 3. 1: Diagram Jalur



Sumber: Penulis, 2018

- b. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang sudah dirumuskan.

Koefisien jalur (*path*) pada dasarnya merupakan koefisien regresi yang terstandar, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah di set dalam angka baku atau Z-score (rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1). Koefisien jalur yang distandarkan ini digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3. Menghitung koefisien jalur secara individu

Untuk mengetahui signifikansi dari analisis jalur dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau ($0,05 \leq \text{Sig}$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan). Apabila nilai probabilitas

0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau ($0,05 \geq \text{Sig}$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima (signifikan)

4. Meringkas dan menyimpulkan

Meringkas hasil penelitian dan membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Setelah itu menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan saran/masukan baik untuk penelitian selanjutnya maupun memberikan saran untuk objek penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Gambaran umum tempat penelitian akan membahas mengenai sejarah singkat Provinsi Jawa Tengah, hal-hal yang berkaitan erat dengan variabel penelitian yang digunakan yaitu keadaan geografis dan juga keadaan penduduk. Selain itu juga akan menjelaskan mengenai perkembangan dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1.1 Kondisi Geografi Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah Provinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1950 pada tanggal 04 Juli Tahun 1950. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa yang letaknya diapit oleh dua Provinsi besar yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak antara $5^{\circ} 4'$ dan $8^{\circ} 3'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 30'$ dan $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang letaknya di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 32.548 km^2 atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Luas wilayah tersebut terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80%) lahan sawah dan 2,25 juta hektar

(69,20%) bukan lahan sawah. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah Selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Tegal, dan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi topografi wilayah Provinsi Jawa Tengah beraneka ragam meliputi daerah dataran tinggi dan juga pegunungan yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang tersebar hampir di seluruh Jawa Tengah; dan juga pantai yaitu pantai utara dan selatan. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wilayah cukup besar untuk kawasan hutan, pertanian, perkebunan, peternakan perikanan pertambangan, industry, pariwisata, pemukiman dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Iklim di Jawa Tengah merupakan iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.000mm setiap tahun dengan suhu berkisar 21-32°C.

Secara fisiografis, Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi tanah yang relative subur. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif diantaranya Gunung Merapi (di Boyolali-Klaten-Magelang), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung-Wonosobo-Magelang), dan Gunung Dieng (di Banjarnegara). Sedangkan sungai besar yang ada di Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah Sungai Bengawan Solo, Kali Pemali, Kali Comal, Kali Bodri, Kali Serayu, Sungai Bogowonto, Sungai Luk Ulo, dan Kali Progo.

4.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Menurut Katalog Statistika Gender Provinsi Jawa Tengah 2016 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai 34,02 juta jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16,87 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 17,15 juta jiwa. Provinsi Jawa Tengah mempunyai jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa Barat (47,38 juta jiwa) dan Jawa Timur (39,07 juta jiwa). Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,73% (periode tahun 2010-2016).

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4. 1 : Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2012 s.d 2016 (juta rupiah)

uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHK Th.2010	691.343.116	726.655.118	764.959.151	806.775.362	849.383.565
PDRB ADHB	754.529.436	830.016.016	922.471.181	1.011.850.969	1.092.030.920

Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah 2018

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DI Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2016 bisa dilihat dalam table 4.1. pada table 4.1 menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Jawa Tengah baik PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. Kondisi yang sama juga berlaku pada PDRB ADHK 2010 (Atas Dasar Harga Konstan 2010) Provinsi Jawa Tengah yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan meskipun kenaikannya tidak sebesar ADHB.

Untuk perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2012-2016 juga mengalami kenaikan. Data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 bisa dilihat pada lampiran. Rata-rata PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar Rp 103.152.832,50 (dalam juta rupiah) dan rata-rata PDRB terendah yaitu kota magelang sebesar Rp 4.999.499,78 (dalam juta rupiah). PDRB perkapita Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih terjadi ketidak merataan pendapatan hal ini bisa dilihat pada Gambar 1.1.

4.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2012-2016. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dicapai oleh Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Capaian nilai PAD yang tinggi ini juga diiringi dengan nilai PDRB yang tinggi di Kabupaten/Kota bersangkutan. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 tersaji di lampiran.

4.1.5 Dana Alokasi Umum

Besaran jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. peningkatan DAU tersebut menunjukkan semakin besarnya celah fiskal yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan perbedaan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing Kabupaten/Kota yang setiap tahunnya semakin besar.

Selama kurun waktu tahun 2012-2016, daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menerima DAU terkecil adalah Kota Salatiga sedangkan daerah penerima DAU tertinggi adalah Kabupaten Banyumas. Data DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 tersaji pada lampiran

4.1.6 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengaturan besaran DAK tidak sedetail DAU dan DBH. Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 hanya menyebutkan DAK akan ditentukan setiap tahun dalam APBN.

Daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan porsi DAK tertinggi adalah Kabupaten Cilacap dan daerah dengan porsi DAK terendah adalah Kota Magelang. Data DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 tersaji dalam lampiran.

4.1.7 Dana Bagi Hasil

Daerah yang menerima Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar selama tahun 2012-2016 adalah Kabupaten Kudus, sedangkan daerah dengan DBH terkecil adalah Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kota Salatiga, dan Kabupaten Pekalongan.

Besaran DBH yang berbeda-beda antara Kabupaten/Kota ini menggambarkan keberagaman potensi SDA dan perpajakan, serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Data DBH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 tersaji dalam lampiran.

4.1.8 Belanja Modal

Selama tahun 2012-2016 daerah dengan total belanja modal terbesar adalah Kota Semarang. Jumlah belanja modal yang cukup besar tersebut jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah cukup wajar mengingat Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi yang juga merupakan pusat perekonomian di Jawa Tengah.

Sementara itu wilayah yang memiliki total belanja modal terendah selama tahun 2012-2016 adalah Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Purbalingga. Belanja modal pada daerah-daerah tersebut relatif lebih kecil karena kebutuhan pembangunan dan luas wilayah yang memang tidak terlalu besar. Data Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 tersaji dalam lampiran.

4.2 Pemilihan Model dan Metode Estimasi

Dalam analisis model regresi data panel, terdapat tiga teknik dalam mengestimasi data panel yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dalam proses penentuan teknik estimasi yang tepat tersebut perlu dilakukan dengan pengujian model yaitu uji Chow (*Chow Test*), Uji Hausman (*Hausman Test*), dan Uji *Langrange Multiplier* (*LM Test*). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui model mana yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Berikut hasil dari pengolahan data panel dari pengujian model dengan menggunakan *software/aplikasi E-views 9* pada penelitian ini:

a. Uji Chow (*Chow Test*)

Chow test adalah pengujian untuk menentukan metode pendekatan antara PLS dan FEM yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Pooled Least Square (PLS)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Keputusan:

Jika Prob. (F-statistic) $< \alpha$, maka H_0 ditolak.

Jika Prob. (F-statistic) $> \alpha$, maka H_0 diterima.

Berikut merupakan hasil dari Uji Chow (*Chow Test*) untuk persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2:

Tabel 4. 2 : Hasil Uji Chow (Chow Test) Persamaan Struktural 1

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ_BM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.271710	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	104.596990	34	0.0000

Sumber : Hasil olah statistik, E-views 9

Tabel 4. 3 : Hasil Uji Chow (Chow Test) Persamaan Struktural 2

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ_PE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	676.425898	(34,135)	0.0000
Cross-section Chi-square	900.158252	34	0.0000

Sumber: Hasil Olah Statistik, E-views 9

Dari hasil pengujian *Chow Test* dengan *redundant test* persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 seperti yang ada di tabel 4.2 dan tabel 4.3 tersebut kedua persamaan menunjukkan hasil Prob. Cross-Section F masing-masing sebesar 0.0000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil jika di bandingkan dengan nilai $\alpha = 5\%$ (0,005), maka H_0 ditolak. Sehingga kesimpulannya persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 lebih tepat menggunakan model *Fixeed Effect Model* (FEM) dibandingkan dengan model *Pooled Least Square* (PLS).

b. Uji *Lagrange Multiplier (LM Test)*

Uji Lagrange Multiplier (LM Test) adalah pengujian untuk menentukan metode pendekatan mana yang lebih baik antara REM dan PLS. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Pooled Least Square (PLS)}$

$H_1 = \text{Random Effect Model (REM)}$

Keputusan:

Jika Prob Breusch-Pagan (Both) $< \alpha$, maka H_0 ditolak.

Jika Prob Breusch-Pagan (Both) $> \alpha$, maka H_0 diterima.

Berikut hasil uji Lagrange Multiplier dari persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2:

Tabel 4. 4 : Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test) Persamaan Struktural 1

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	24.14310	0.382963	24.52606
	(0.0000)	(0.5360)	(0.0000)

Sumber: olah data statistik, E-views 9

tabel 4. 5: Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan Struktural 2

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	272.2410	1.334985	273.5760
	(0.0000)	(0.2479)	(0.0000)

Sumber: hasil olah data statistik *E-views 9*

Dari hasil pengujian LM Test kedua persamaan tersebut menunjukkan hasil Prob.BP sebesar 0.0000 yang artinya nilai Prob. BP tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan α (0.05), maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect Model* (REM) lebih baik atau lebih tepat jika dibandingkan dengan model *Pooled Least Square* (PLS).

c. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman (*Hausman Test*) adalah pengujian statistik yang digunakan untuk memilih antara model REM dan FEM yang paling tepat untuk digunakan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

Keputusan:

Jika nilai Prob. Cross-Section Random $< \alpha$ maka H_0 ditolak.

Jika nilai Prob. Cross-Section Random $> \alpha$ maka H_0 diterima.

Hasil uji hausman dari persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 : Hasil Uji Hausman Persamaan Struktural 1

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ_BM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.307321	4	0.0539

Sumber: hasil olah data statistik, E-views 9

Tabel 4. 7 : Hasil Uji Hausman Persamaan Struktural 2

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ_PE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.258048	5	0.0040

Sumber: hasil olah data statistik, E-views 9

Dari hasil uji hausman tabel 4.6 dan 4.7 Persamaan 1 menghasilkan nilai Prob. *Cross-section random* sebesar 0.0539 sedangkan Prob. *Cross-section random* persamaan 2 adalah sebesar 0.0040. maka untuk persamaan 1 H0 diterima sedangkan untuk persamaan 2 H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan jika persamaan 1 lebih baik menggunakan *Random Effect Model* dan persamaan 2 lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model*.

Hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa model path persamaan 1 menggunakan adalah Random Effect (RE) dan model path persamaan 2 menggunakan Fixed Effect (FE).

4.3 Hasil Analisis Jalur

Pada analisis jalur (Path) akan dianalisis besarnya pengaruh dari variabel eksogen (dependent) terhadap variabel endogen (independent) sama halnya dengan regresi linier. Dalam analisis jalur selain terdapat pengaruh secara langsung namun juga terdapat pengaruh secara tidak langsung dan pengaruh total. Adapun pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal adalah sebagai berikut:

4.3.1 Hasil Pengujian Pengaruh PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4) terhadap Belanja Modal (Y1)

Berdasarkan hasil uji chow, uji LM, dan uji Hausman yang telah dilakukan pada persamaan 1, maka didapatkan hasil model data panel terbaik untuk persamaan struktural 1 yaitu model *Random Effect Model* (REM). Berikut merupakan hasil dari pengolahan data persamaan struktural 1:

Tabel 4. 8 : Hasil Uji Persamaan Struktural 1, Pengaruh PAD (X1), DAU (X2), DAK(X3), dan DBH (X4) Terhadap Belanja Modal (Y1)

variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
PAD	0,512425	0.0000	Signifikan
DAU	0.256374	0.0046	Signifikan
DAK	0.144760	0.0000	Signifikan
DBH	0.192399	0.0028	Signifikan
R-Squared : 0,608793			
Nilai Prob. (Uji F) : 0.0000			

Sumber : hasil olah data statistik E-views 9

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 1 pada tabel 4.8 tersebut menunjukkan bahwa nilai R-squared atau koefisien determinasi bernilai sebesar 0.608793. nilai R-squared tersebut berarti bahwa variabel independent berupa PAD, DAU, DAK, dan DBH mampu menjelaskan varians dari variabel dependent yaitu Belanja Modal sebesar 60,87% sedangkan 39,13% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk hasil uji F diperoleh hasil nilai dari probabilitas sebesar 0.0000. nilai probabilitas tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ (0.05), yang artinya bahwa variabel independent yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama (simultan) telah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil uji t (parsial) terdapat perbedaan hubungan dari masing-masing keempat variabel independent. Variabel independent yang terdiri dari PAD, DAU, DAK dan DBH mempunyai nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0.000; 0.0046; 0.0000; 0.0028 yang semuanya berada dibawah tingkat $\alpha = 5\%$ (0.05). dengan demikian, maka masing-masing variabel PAD, DAU, DAK, dan

DBH signifikan positif berpengaruh pada variabel dependen yaitu belanja modal. Dikatakan berpengaruh signifikan positif karena masing-masing dari variabel tersebut mempunyai nilai positif pada koefisien masing-masing variabel.

Nilai koefisien pada variabel PAD yaitu sebesar 0,512425. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan Rp 1000 pada PAD maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar Rp 512,42. Pada variabel DAU nilai koefisiennya sebesar 0,256374. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan Rp 1000 pada DAU maka akan menaikkan belanja modal sebesar Rp 256,37. Untuk variabel DAK nilai koefisiennya sebesar 0,144760. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan DAK sebesar Rp 1000 maka akan meningkatkan belanja modal sebesar Rp 144,76. Pada variabel DBH nilai koefisiennya menunjukkan nilai sebesar 0,192399. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan sebesar Rp 1000 pada DBH maka akan meningkatkan belanja modal sebesar Rp 192,39.

Pada hasil estimasi metode random effect persamaan struktural pertama ini diperoleh koefisien dari masing-masing Kabupaten dan Kota. Koefisiennya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 : Hasil Estimasi Cross Section Persamaan Belanja Modal

kabupaten/kota	Efek	kabupaten/kota	efek
Kab. Banjarnegara	0.143194	Kab. Pemasang	-0.102413
Kab. Banyumas	-0.165865	Kab. Purbalingga	-0.218932
Kab. Batang	-0.075734	Kab. Purworejo	-0.015292
Kab. Blora	0.232738	Kab. Rembang	-0.16783
Kab. Boyolali	0.079695	Kab. Semarang	0.024392

Kabupaten/kota	Efek	Kabupaten/kota	efek
Kab. Brebes	0.152988	Kab. Sragen	-0.100225
Kab. Cilacap	0.101546	Kab. Sukoharjo	-3.53E-05
Kab. Demak	0.433625	Kab. Tegal	-0.023306
Kab. Grobogan	0.07695	Kab. Temanggung	0.040722
Kab. Jepara	-0.006599	Kab. Wonogiri	0.140495
Kab. Karanganyar	-0.09762	Kab. Wonosobo	-0.011998
Kab. Kebumen	0.31388	Kota Magelang	0.028953
Kab. Kendal	-0.036296	Kota Pekalongan	0.043981
Kab. Klaten	-0.00777	Kota Salatiga	-0.030403
Kab. Kudus	-0.034521	Kota Semarang	-0.055715
Kab. Magelang	-0.146297	Kota Surakarta	-0.058151
Kab. Pati	-0.118379	Kota Tegal	-0.185948
Kab. Pekalongan	-0.153829		

Sumber : Hasil olah data statistik, E-views 9

Dari hasil estimasi cross section diatas sebagian besar daerah di Jawa Timur mempunyai koefisien yang negatif yaitu sebanyak 22 Kabupaten/Kota. Daerah yang memiliki koefisien negatif tertinggi yaitu Kabupaten Sukoharjo dan daerah yang memiliki koefisien negatif terendah adalah Kabupaten Jepara. Untuk daerah yang memiliki koefisien positif tertinggi yaitu Kabupaten Demak, dan yang terendah yaitu Kabupaten Semarang.

4.3.2 Hasil Pengujian Pengaruh PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4), dan Belanja Modal (Y1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2)

Berdasarkan uji chow, uji LM, dan uji Hausman yang telah dilakukan pada persamaan struktural 2, maka di dapatkan hasil model data panel terbaik untuk persamaan struktural 2 yaitu model *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut merupakan hasil dari pengolahan data persamaan struktural 2:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Persamaan 2, Pengaruh PAD (X1), DAU (X2), DAK(X3), dan DBH (X4), Belanja Modal (Y1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2)

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
PAD	0,177967	0,0000	Signifikan
DAU	0,020732	0,1620	Tidak Signifikan
DAK	0,019735	0,0003	Signifikan
DBH	0,026115	0,1140	Tidak Signifikan
Belanja Modal	0,022699	0,0290	Signifikan
R-squared : 0,996288			
Nilai Prob. (Uji F) : 0.0000			

Sumber : Hasil olah data statistik, E-views 9

Dari hasil persamaan struktural 2 yang ditunjukkan pada tabel 4. 10 menunjukkan bahwa nilai R-squared atau koefisien determinasi bernilai sebesar 0,996288. Nilai R-squared tersebut berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal mampu menjelaskan varians dari variabel dependent yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 99,62% sedangkan 0,38% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pada hasil uji f diperoleh hasil nilai probabilitas sebesar 0.0000. nilai probabilitas tersebut lebih kecil jika di bandingkan dengan $\alpha=5\%$ (0,05) yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

Adapun untuk hasil uji t (parsial) terdapat perbedaan hubungan dari keempat variabel independen. Hanya PAD, DAK, dan Belanja Modal yang

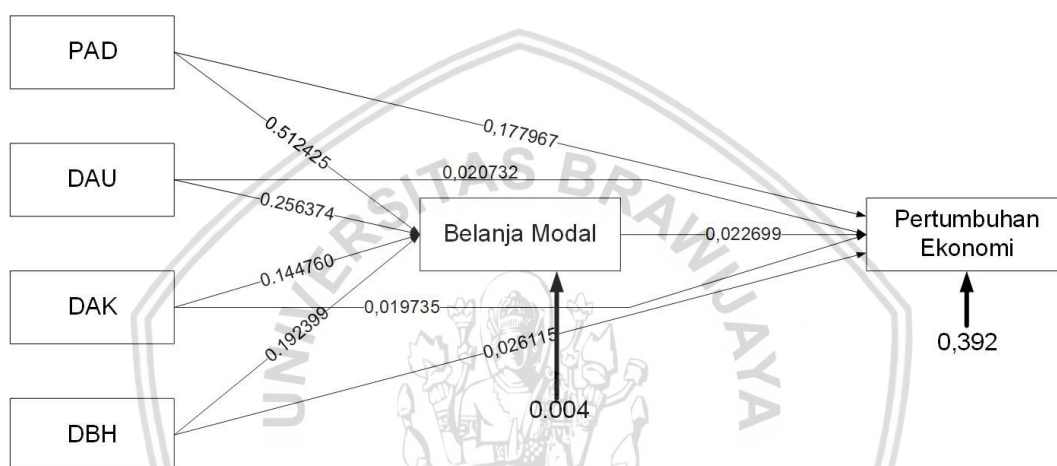
memiliki nilai probabilitas dibawah tingkat $\alpha = 5\%$ (0.005) yaitu nilai probabilitas masing-masing variabel sebesar 0,0000; 0,0000; dan 0,0290. Variabel PAD, DAK dan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena ketiga variabel tersebut mempunyai nilai positif pada koefisien masing-masing variabel. Pada variabel independen DAU, dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena nilai probabilitasnya lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0,005) yaitu masing-masing secara berurutan sebesar 0,1620; dan 0,1140. Kedua variabel tersebut memiliki nilai koefisien yang positif.

Nilai koefisien pada variabel PAD adalah sebesar 0,177967. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan Rp 1000 pada PAD maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 177,98. Variabel DAU memiliki nilai koefisien sebesar 0,020732. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan Rp 1000 pada DAU akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 20,73. Variabel DAK memiliki nilai koefisien sebesar 0,019735. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan Rp 1000 pada DAK akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 19,74. Variabel DBH memiliki nilai koefisien sebesar 0,026115. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan Rp 1000 pada Belanja Modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 26,12. Variabel Belanja Modal memiliki nilai koefisien sebesar 0,022699. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0),

sehingga setiap kenaikan Rp 1000 pada Belanja Modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 22,70.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur yang diperoleh, maka dapat digambarkan dalam model persamaan jalurne sebagai berikut:

Gambar 4. 1: Model Hasil Analisis Jalur



Sumber : data diolah, 2018

Pada hasil uji analisis jalur model struktural kedua secara parsial menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang tidak signifikan yaitu variabel DAU, DBH, dan Belanja Modal. Ketiga variabel tersebut tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi., yang artinya bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah tidak dipengaruhi oleh DAU, DAK, dan Belanja Modal.

Pada hasil estimasi metode fixed effect persamaan struktural kedua ini diperoleh koefisien dari masing-masing Kabupaten dan Kota. Koefisiennya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11 : Hasil Estimasi *Cross Section* Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Kab/Kota	efek	Kab/Kota	Efek
Kab. Banyumas	0.551746	Kab. Banjarnegara	-0.164452
Kab. Boyolali	0.15304	Kab. Batang	-0.151957
Kab. Brebes	0.509111	Kab. Blora	-0.08093
Kab. Grobogan	0.016546	Kab. Cilacap	-0.676808
Kab. Jepara	0.102795	Kab. Demak	-0.041543
Kab. Karanganyar	0.33451	Kab. Pekalongan	-0.132005
Kab. Kebumen	0.030383	Kab. Pemalang	-0.026196
Kab. Kendal	0.48374	Kab. Purbalingga	-0.036771
Kab. Klaten	0.424631	Kab. Purworejo	-0.306253
Kab. Kudus	0.383292	Kab. Rembang	-0.281886
Kab. Magelang	0.205895	Kab. Temanggung	-0.147888
Kab. Pati	0.432151	Kab. Wonosobo	-0.217624
Kab. Semarang	0.5926	Kota Magelang	-0.951
Kab. Sragen	0.318391	Kota Pekalongan	-0.810153
Kab. Sukoharjo	0.314481	Kota Salatiga	-0.554161
Kab. Tegal	0.233651	Kota Semarang	-0.698249
Kab. Wonogiri	0.151806	Kota Tegal	-0.504355
Kota Surakarta	0.543461		

Hasil olah data statistik, E-views 9

Dari hasil estimasi *cross section* menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki koefisien positif ataupun negatif hampir seimbang. Dimana dari 35 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki koefisien positif sebanyak 18 Kabupaten/Kota dan sisanya memiliki koefisien yang negatif. Daerah dengan koefisien positif tertinggi adalah Kabupaten Semarang yaitu sebesar 0,5926 dan daerah dengan koefisien positif terendah yaitu Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 0.016546. daerah dengan koefisien negatif tertinggi yaitu Kota Magelang sebesar -0.951, dan daerah dengan koefisien negatif terendah yaitu Kabupaten Pemalang yaitu sebesar -0.026196.

Kabupaten/Kota yang memiliki koefisien positif yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar,, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Sedangkan kota dan kabupaten yang lainnya memiliki koefisien negatif. Koefisien dapat diinterpretasikan sebagai pertumbuhan ekonomi akan bernilai sesuai koefisien jika variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal bernilai 0. Kabupaten dan Kota yang memiliki koefisien positif menandakan bahwa apabila PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal bernilai 0 maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota masih bernilai positif atau masih terdapat pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota tersebut. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki koefisien negatif menunjukkan bahwa apabila PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja modal memiliki nilai 0 maka pertumbuhan ekonomi akan bernilai negatif. Hal tersebut berarti bahwa PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja modal sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota yang memiliki koefisien negatif. (Noer, 2012)

4.3.3 Ketetapan Model Penelitian

Pengujian ketetapan model (*Goodness of Fit*) menggunakan koefisien determinasi (r^2) total dari kedua persamaan. Hasil dari persamaan struktural 1 (per

tama) diperoleh nilai r^2 sebesar 0,608 sedangkan hasil dari persamaan 2 (kedua) diperoleh nilai r^2 sebesar 0,998. Berikut adalah ketetapan model yang diperoleh dengan rumus:

$$\begin{aligned} r^2 \text{ model} &= 1 - (1 - r^2_1) (1 - r^2_2) \\ &= 1 - (1 - 0,608) (1 - 0,996) \\ &= 1 - (0,392) (0,004) 0,001568 \\ &= 0,998 \text{ atau } 99,8\% \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan ketetapan model menunjukkan nilai sebesar 99,8%, yang berarti bahwa kontribusi model dalam menjelaskan hubungan struktural dari keenam variabel yang diteliti adalah sebesar 99,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dengan demikian maka model analisis jalur yang dihasilkan dalam penelitian ini memenuhi nilai ketetapan model yang baik karena nilainya yang mendekati 100%, sehingga model dalam penelitian ini layak untuk diinterpretasikan untuk pengujian hipotesis.

4.3.4 Pengaruh Tidak Langsung

Analisis jalur (*path analysis*) tidak hanya dapat digunakan untuk melihat akibat atau pengaruh langsung tapi juga pengaruh tidak langsung dari suatu variabel yang dihipotesiskan sebagai penyebab (*causes*) terhadap variabel yang diperlakukan sebagai akibat (*effect*). Berikut hasil perhitungan besarnya pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal:

Tabel 4. 12 : Pengaruh Tidak Langsung Variabel Independen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Variabel	Pengaruh Langsung		Pengaruh Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal
	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	
PAD	0,512425	0,177967	$0,512425 \times 0,022699 =$ 0,011631
DAU	0,256374	0,020732	$0,256374 \times 0,022699 =$ 0,005819
DAK	0,144760	0,019735	$0,144760 \times 0,022699 =$ 0,003286
DBH	0,192399	0,026115	$0,192399 \times 0,022699 =$ 0,004367
Belanja Modal	-	0,022699	-

Sumber: hasil olah data statistik, E-views 9

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa adanya pengaruh tidak langsung antara PAD (X1) dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y2) melalui Belanja Modal (Y1). Besarnya pengaruh tidak langsung variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal adalah sebesar 0,011631 atau sebesar 11,631%. Ini berarti bahwa PAD dapat meningkatkan Belanja Modal, yang selanjutnya Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh DAU (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) melalui Belanja Modal (Y1) adalah sebesar 0,005819 atau sebesar 5,819%, yang menunjukkan bahwa DAU dapat meningkatkan Belanja Modal, yang selanjutnya Belanja Modal berdampak positif pada Pertumbuhan Ekonomi.

Selanjutnya pengaruh DAK (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) melalui Belanja Modal (Y1) menunjukkan hasil sebesar 0,003286 atau 3,286%. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAU dapat meningkatkan Belanja Modal yang

nantinya belanja modal dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara positif. Kemudian, pengaruh tidak langsung DBH (X4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) melalui Belanja Modal (Y1) menunjukkan hasil sebesar 0,004367 atau sebesar 4,367%. Ini menunjukkan bahwa DBH dapat meningkatkan Belanja Modal, yang selanjutnya Belanja Modal berdampak positif pada Pertumbuhan Ekonomi.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

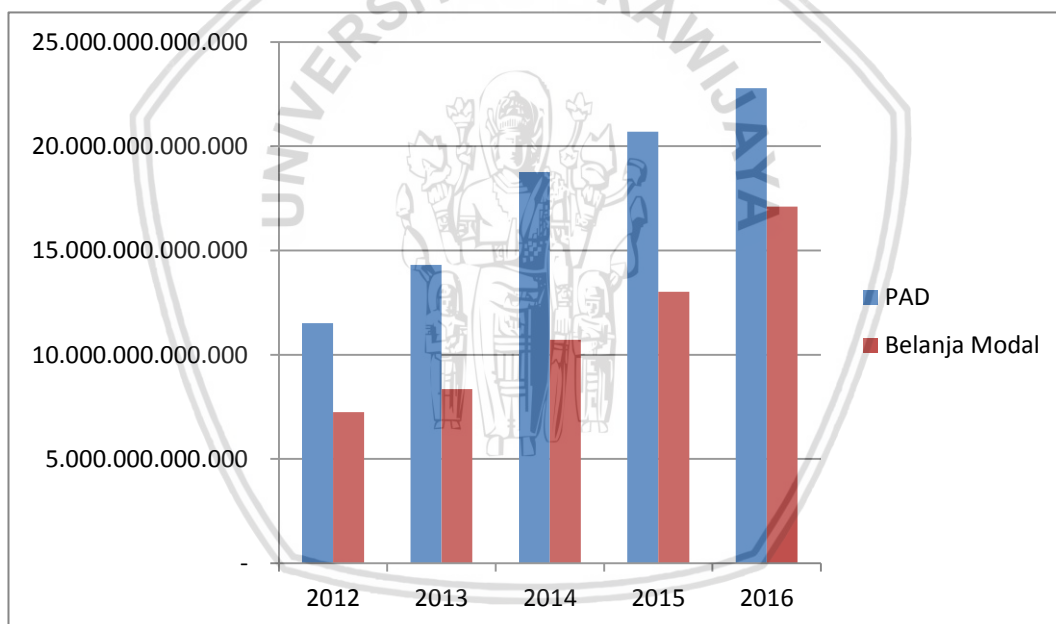
4.4.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerah secara mandiri. Salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai belanja daerah termasuk belanja modal untuk membangun infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui uji regresi yang mana nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang mana nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ (0.05) yang menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil koefisien jalur menunjukkan hasil

sebesar 0,512425 yang mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Artinya, semakin baik atau semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 maka akan menyebabkan semakin tinggi pula pelaksanaan Belanja Modal daerah. Hal ini terbukti bahwa setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal selalu mengalami peningkatan. berikut grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016:

Gambar 4. 2: Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), data diolah 2018

Alokasi Belanja Modal berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara meningkatkan aset tetap pemerintah daerah yang terdiri dari infrastruktur, bangunan, peralatan, dan harta-harta tetap lainnya yang nantinya akan berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah akan mengalokasikan sebagian dana yang dimilikinya untuk belanja modal. Pengalokasian belanja modal tersebut digunakan untuk mengganti aset lama ataupun membeli aset baru sehingga setiap tahunnya aset pemerintah daerah akan bertambah nilainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dananya bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal yang telah dianggarkan pada setiap tahunnya.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Yustikasari (2007), Hendriwiyanto (2014), Ningsasra (2016), dan Azhar (2017) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

4.4.2 Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang berasal dari APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan pada seluruh Kabupaten/Kota untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dan untuk membiayai kebutuhan daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini terbukti dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai probabilitas 0.0046 lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Untuk nilai koefisien jalur sebesar 0.256374. Hasil koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang artinya jika semakin tinggi nilai

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat maka akan menyebabkan Belanja Modal yang semakin tinggi pula pada daerah tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki keterkaitan dengan Belanja Modal. Hal ini dikarenakan fungsi dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah yaitu untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik yang tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Maka dari itu semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan meningkatkan belanja modal daerah tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nopiani (2016), Ningsasra (2016), dan Widiasih (2017). Hal ini dikarenakan pendapatan dari DAU dalam APBD meningkat terus menerus sehingga akan meningkatkan belanja modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal karena tujuan utama dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dikarenakan adanya ketidakmerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *block grant* yang artinya penggunaan diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung kecil, maka Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran penting untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pengalokasian Dana Alokasi

Khusus (DAK) hanya untuk daerah tertentu yang tujuannya untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dibuktikan melalui uji regresi yang hasilnya menunjukkan probabilitas sebesar 0,0000 yang mana nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 5\%$ (0,05) dan nilai koefisien sebesar 0.144760. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan menyebabkan nilai dari Belanja Modal yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004).

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satunya diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomi yang panjang, termasuk juga untuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah aset tetap milik pemerintah yang nantinya berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), Azhar (2017) yang menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut

menunjukkan bahwa dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus seperti sarana dan prasarana yang manfaatnya diperoleh jangka panjang yang mana sesuai dengan kriteria belanja modal. Jadi, jika Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh suatu pemerintah daerah besar maka belanja modal daerah tersebut juga akan meningkat.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN kemudian dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi dari daerah penghasil.

Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0028 yang mana nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) yang artinya hasil tersebut signifikan. Hasil koefisien jalur menunjukkan hasil sebesar 0.192399, yang mengindikasikan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Artinya semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah maka akan diikuti dengan belanja modal yang semakin tinggi.

Hasil ini sama dengan hasil studi yang dilakukan oleh Holzet-Eakin *et al.* (1994) dan Gamkhar & Oates (1996) dalam Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources*. Hasil ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Wandira (2013). Provinsi dengan nilai DBH yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber

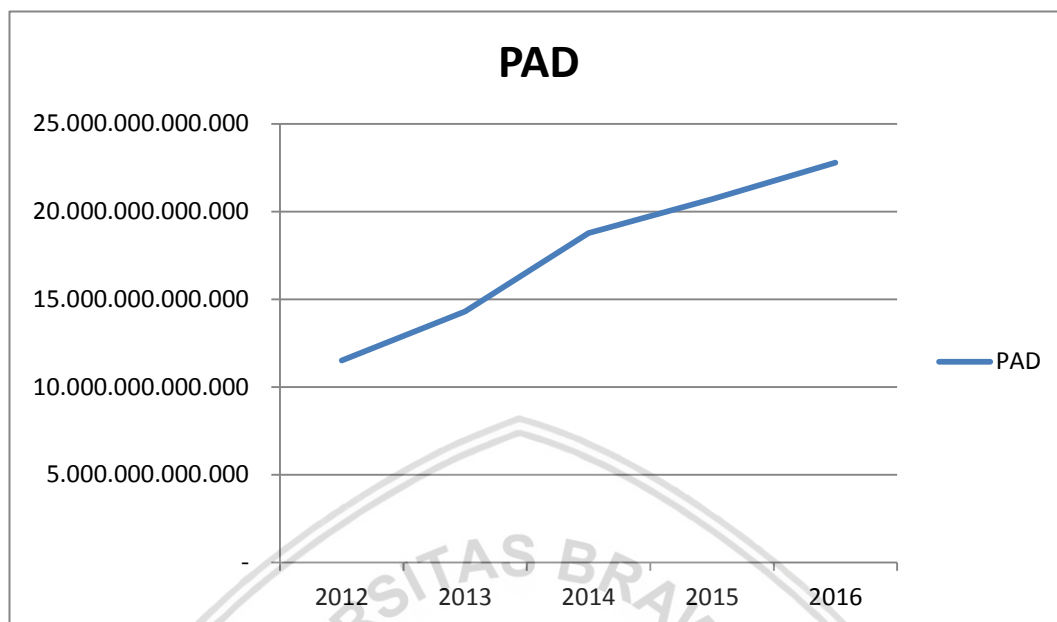
penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD, DAU, dan DAK.

4.4.3 Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji regresi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05) yang mana hasilnya menunjukkan signifikan. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Untuk hasil koefisien jalur menunjukkan hasil sebesar 0,177967 mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang artinya semakin tinggi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 maka akan menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat begitupula sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh/bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagai berikut:

Gambar 4. 3 : Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2018

PAD memiliki sifat yang fleksibel dalam segi pemanfaatannya sehingga menyebabkan daerah leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya yang diantaranya berupa pembangunan sarana dan prasarana publik dasar yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Setyawati (2007), yang menyatakan bahwa semakin tinggi PAD maka akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah yang dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian.

4.4.4 Pengaruh DAU, DAK, DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2). Dari hasil uji regresi secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil nilai probabilitas sebesar 0,1620. Nilai probabilitas tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05) yang menunjukkan hasil tersebut tidak signifikan. Artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Untuk koefisien jalur menunjukkan hasil nilai sebesar 0,020732 yang mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) yang artinya semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima maka akan menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi yang semakin tinggi, begitupula sebaliknya. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah cukup besar jika dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini.

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2013), namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2007). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak disertai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharusnya untuk pemerataan keuangan tiap daerah dalam rangka desentralisasi dan ditetapkan bobot setiap daerah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan wilayah ekonomi dan potensi daerah. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima setiap daerah berbeda-beda sesuai kebutuhan setiap daerah. Daerah dengan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi akan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih rendah, karena perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan pada celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan potensi fiskal suatu daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima tidak semuanya digunakan untuk belanja modal untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana publik yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, melainkan lebih besar digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung yang mana alokasi terbesar yaitu untuk belanja pegawai. Berikut tabel perbandingan belanja modal dan belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung:

Tabel 4. 13 Rata-rata Belanja Pegawai dan Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Dalam Juta Rupiah)

keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Pegawai	762.843	819.899	913.228	974.334	1.021.396
Belanja Modal	207.024	238.499	306.132	371.999	488.475

Sumber : DJPK, data diolah, 2018

Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sekaligus sebagai prioritas nasional sesuai dengan fungsi perwujudan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan terutama untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana publik. Dengan adanya pembangunan infrastruktur merupakan bentuk investasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya

pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana publik yang mendukung pada suatu daerah maka hal ini nantinya juga akan menarik minat para investor untuk berinvestasi pada daerah tersebut, sehingga pada waktunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dari hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan hasil nilai probabilitas sebesar 0,0003 yang mana nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05) yang menunjukkan bahwa hasilnya signifikan. Artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Untuk hasil koefisien jalur menunjukkan hasil sebesar 0,019735 yang mengindikasikan bahwa pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh suatu daerah maka akan menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi pula pada daerah tersebut. Begitupula sebaliknya jika Dana Alokasi Khusus yang diterima rendah maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan rendah.

Hasil penelitian didukung oleh hasil penelitian dari Taaha (2009) yang juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pemerintah daerah dialokasikan khusus untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana salah satunya infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

pembangunan sarana prasarana khususnya infrastruktur ekonomi berdasarkan kebutuhan dapat mendorong kegiatan produksi barang dan jasa sehingga nantinya ekonomi daerah akan tumbuh.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan hasil nilai probabilitas sebesar 0,1140 yang mana nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05). Hasil nilai probabilitas tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan yang artinya bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil koefisien jalurnya menunjukkan hasil sebesar 0,026115. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif, yang artinya semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh suatu daerah maka akan menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, begitu pula sebaliknya jika Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima suatu daerah rendah maka Pertumbuhan pada daerah tersebut juga akan rendah.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Husna (2013) dan Azzahra (2015) yang juga menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan potensi yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda. Ada daerah dengan kekayaan alam yang melimpah namun ada pula daerah yang kekayaan alamnya tidak terlalu besar tapi struktur perekonomiannya tertata dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan potensi pajak. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari pajak dan sumber daya alam, jadi jika suatu

daerah memiliki pajak dan sumber daya alam yang kecil, maka pembagian hasil pajak dan sumber daya juga akan kecil. Maka dari itu, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak bisa dikatakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4.5 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

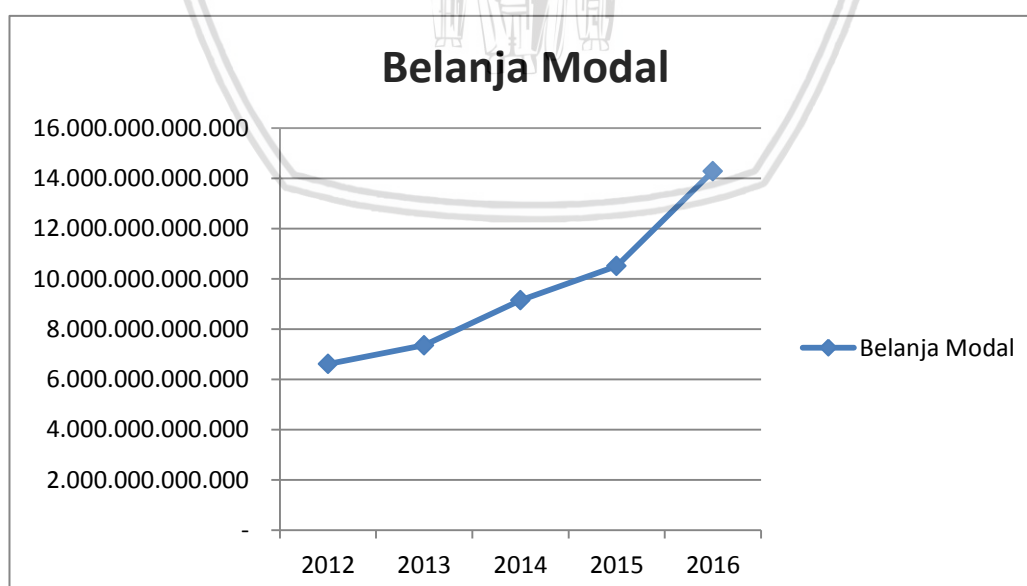
Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja gedung dan bangunan, belanja untuk perolehan tanah, belanja peralatan dan aset tak berwujud. Pada sebuah sistem perekonomian jika terjadi peningkatan belanja maka akan meningkatkan pendapatan sehingga nantinya akan mendorong peningkatan belanja dan pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori dari Keynes yang menyatakan bahwa belanja yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Jadi, apabila seseorang membelanjakan uang yang dimilikinya maka ia akan membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus tersebut akan terus menerus berlanjut sehingga akan membuat perekonomian berjalan secara normal. Maka dari itu, semakin besar nilai belanja modal maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik pula.

Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji regresi yang mana nilai probabilitasnya menunjukkan nilai sebesar 0,0290. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05). Untuk

hasil koefisien jalurnya menunjukkan hasil sebesar 0,022699. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Belanja modal memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter tolak ukur dari suatu kegiatan pembangunan, karena dengan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang ada dalam suatu perekonomian. Parameter tersebut menjadi landasan pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dasar untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dapat diambil dari anggaran belanja modal. Setiap tahunnya realisasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada Grafik berikut:

Gambar 4. 4 : Grafik Total Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2018

Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan realisasi belanja modal daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada rentan waktu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu tahun 2012-2016 Kota Semarang mendominasi realisasi belanja modal tertinggi di Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh Kab. Demak, dan Kab. Cilacap. Ketiga daerah dengan realisasi belanja modal tertinggi tersebut merupakan daerah yang dimana kawasan tersebut mampu memaksimalkan realisasi belanja modal untuk pembangunan pelayanan masyarakat serta infrastruktur yang memadai.

Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nurmainah (2013). Hal ini juga sesuai dengan teori Wegner yang menyatakan bahwa aktifitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat apabila pertumbuhan ekonomi meningkat.

4.4.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik telah diperoleh hasil pengaruh langsung antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana hasilnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur sebesar 0,177967 dengan nilai sig sebesar 0,0000 (sig probabilitas < 0,05). Selanjutnya dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. Dari hasil perhitungan menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,011631 sehingga pengaruh tidak langsung adalah signifikan, karena

mempunyai nilai yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang terealisasi dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang berguna untuk kepentingan publik, sehingga akan meningkatkan belanja modal. Belanja modal pemerintah daerah dalam rangka pengadaan sarana prasarana, fasilitas, dan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Maka ketika suatu daerah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, pemerintah daerah akan menambah pengalokasian belanja modal dengan mengambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerahnya. Hal ini dikarenakan tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal dapat menjadi variabel intervening antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil ini didukung oleh penelitian dari Ni Komang Ayuk Sumartini dan I.G.W. Murjana Yasa (2015) yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. Artinya jika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk belanja modal maka akan semakin tinggi pula kegiatan pembangunan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola kekayaan yang dimiliki dan nantinya akan dapat menyebabkan pertumbuhan dalam perekonomian.

4.4.7 Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur sebesar 0,020732 dan nilai signifikan 0,1620 (sig.probabilitas > 0,05). Selanjutnya dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,005819, sehingga pengaruh tidak langsung adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2016.

Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu bangsa yaitu pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan akumulasi modal (Michael P. Todaro, 2004 dalam Wiraswasta, 2017). Kenaikan output per kapita diproksikan dengan PDRB yang merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. Akumulasi modal untuk pelaksanaan pembangunan dapat dipengaruhi oleh DAU yang merupakan salah satu dari dana perimbangan yang merupakan salah satu modal pembangunan. Sehingga model ini dapat dikonstruksikan bahwa belanja modal dapat menjadi variabel intervening antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Ni Made Nopiani dkk. (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi

Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening. Hubungan positif tersebut dapat dipahami sebab pelaksanaan otonomi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik yang terealisasi melalui belanja modal yang juga dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU). jika pelayanan dan pembangunan semakin tinggi maka pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah juga akan semakin tinggi.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan hasil nilai koefisien jalur sebesar 0,019735 dan nilai sig sebesar 0,0003 (sig probabilitas < 0,05). Selanjutnya, hasil pengaruh tidak langsung antara variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal menunjukkan hasil koefisien jalur sebesar $0,144760 \times 0,022699 = 0,003286$ atau sebesar 3,29%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal yang artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat meningkatkan belanja modal, selanjutnya belanja modal akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2016).

Pengaruh langsung Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan hubungan positif tidak signifikan dengan hasil koefisien analisis jalur sebesar 0,026115 dan nilai sig sebesar 0,1440 (sig probabilitas > 0,05). Selanjutnya dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung antara variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal, dimana hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,004367 sehingga pengaruh tidak langsung adalah positif. Hal tersebut berarti bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dapat

meningkatkan belanja modal, yang selanjutnya belanja modal akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

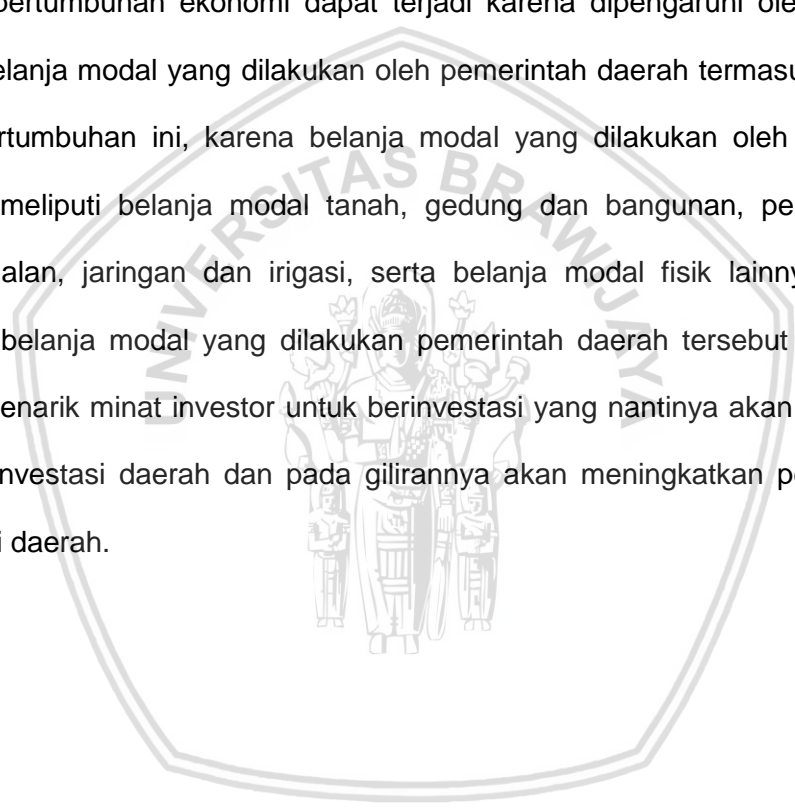
Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan cara meningkatkan dan menciptakan aktivitas baru dalam masyarakat sehingga secara makro akan terjadi peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa pada daerah terkait yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan semakin besar nilai uang yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah melalui pos belanja baik belanja modal ataupun belanja lainnya secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memberikan efek *multiplier* yang mengarahkan pada meningkatnya PDRB, namun syaratnya pembelanjaan tersebut dilakukan pada wilayahnya sendiri.

Hasil pada penelitian ini didukung oleh penelitian dari Rizky (2016) yang menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Langsung. Selain itu juga didukung oleh penelitian dari Wiraswasta (2017) yang juga menyatakan bahwa hubungan tidak langsung antara dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal menunjukkan hasil yang positif.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. Semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) maka akan meningkatkan belanja

modal yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan sebagai modal untuk membiayai belanja pemerintah daerah yang salah satunya yaitu belanja modal yang nantinya dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena dipengaruhi oleh investasi, maka belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk ke dalam teori pertumbuhan ini, karena belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi belanja modal tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal fisik lainnya. Dengan adanya belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah tersebut maka akan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi yang nantinya akan menambah jumlah investasi daerah dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, hasil pengolahan data, dan hasil analisa data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada persamaan model pertama, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka belanja modal yang akan dilakukan juga akan semakin tinggi. Begitupula dengan hasil pengujian persamaan model kedua yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2016 maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pada model structural pertama hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variable Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilai Dana Alokasi Umum (DAU)

maka pelaksanaan belanja modal juga akan semakin tinggi. Namun pada uji parsial model structural kedua terhadap pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa variable Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Pada model structural pertama hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa variable Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal yang artinya semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah maka akan menyebabkan pelaksanaan belanja modal yang juga semakin tinggi. Begitupula hasil pengujian parsial persamaan structural kedua menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pada model structural pertama hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Artinya semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Kabupaten/Kota maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Namun pada uji parsial model structural kedua terhadap pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan hasil bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dengan meningkatnya belanja modal maka pertumbuhan ekonomi

Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

6. Berdasarkan hasil analisis jalur mengenai pengaruh tidak langsung antara variable Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal menunjukkan hasil yang positif. Artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan yang nantinya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga diharapkan bagi pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan daerah agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal secara positif. Hal ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah agar

mengalokasikan sebagian besar penerimaannya untuk belanja modal karena terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal secara positif. Hal ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah agar lebih memprioritaskan atau memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya cukup besar pada bidang-bidang yang berhubungan dengan kepentingan public seperti perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas public lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi maka perlu disertai dengan pembangunan daerah, misalnya dengan lebih memprioritaskan pada bidang-bidang pemeliharaan atau perbaikan infrastruktur utamanya pada daerah terpencil agar dapat menunjang aktivitas sector-sektor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga alokasi belanja tidak hanya terfokus pada belanja yang sifatnya rutin saja tapi juga pada belanja yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R., dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar, dkk. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Subsidi Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Azzumar, Rizky Moh dan Retno, Hermiwati H. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro
- (<http://eprints.undip.ac.id/331331/jurnal.pdf> diakses pada 14 desember 2017)
- Badan Pusat Statistika Jawa Tengah. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2012-2016. Diakses pada 03 Januari 2018.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar.
- Dewi, Ni Wayan Ratna dan I Dewa Gede Dharma Suputra. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3*.
- Dewi, Ni Wayan Nuryanti dan Made Kembar Sri Budhi. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol 04*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.2016. [Djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id). diakses pada 03 Januari 2018.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi paradigma Baru dalam Pemerintahan Lokal dan Hubungan antar Pemerintah Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press(UB Press).
- Fajri, Ahmad. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Sumatera. *E-jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah Vol. 5 No.1*.
- Gujarati N. Damodar dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika(edisi 5)*. Jakarta: Salemba empat.

- Hakim, Lukman. 2013. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). Malang: Universitas Brawijaya
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Imam dan Tri Laksono Mugroho. 2009. *Desentralisasi Fiskal Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Liliana, Bunescu et al. 2011. Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenue?. *International Journal of Arts & Science*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Martono, nanang. 2016. *Metode penelitian sosial konsep-konsep kunci*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen vol. 5 No.2*.
- Mawarni, et al. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 02 No 02*.
- Menteri Dalam Negeri. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Menteri Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 13 ayat (1), 22 Ayat (1), 31 Ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Menteri Keuangan. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tentang Bagan Akun Standar (BAS).
- Menteri Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Ningsra, Yanggi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi UNP. Vol 4 No 1.*
- Noer, Nasrul Hasan Amarulloh. 2012. Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur). Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya.
- Nopiani, Ni Made, et.al. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol.4.*
- Ogujiuba, Kanayo & Terfa W. Abraham. 2012. The Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance. Vol 4 No 11.*
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.* Universitas Islam Indonesia.
- Presiden RI. 1974. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 64 Ayat (2) tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.
- Presiden RI. 1975. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah-daerah.
- Presiden RI. 1999. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Presiden RI. 1999. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
- Presiden RI. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Presiden RI. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Presiden RI. 2001. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- Presiden RI. 2001. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

- Presiden RI. 2003. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Presiden RI. 2004. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Presiden RI. 2004. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
- Presiden RI. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Santoso, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis Vol. 5 No.2*.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianti. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Sigit & Rudi Handoko. 2005. Pertumbuhan Ekonomi 2006: Suatu Estimasi dan Arah Pencapaian Pertumbuhan yang Merata dan Berkualitas. *Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.9*.
- Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol 4 No 2*.
- Sumartini, Ni Komang Ayuk dan I.G.W. Murjana Yasa. 2015. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud. Vol 4 No. 4*.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: ANDI.
- Taaha, Yulia Rinawaty et al. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Usman, husaini, purnomo setiady akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Social [Edisi Kedua]*. Jakarta:PT bumi aksara.
- Utomo, Langgeng Prayitno. 2017. Pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi. Volume 06*.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal. Vol 2 No 1*.
- Widiasih, Ni Nyoman dan Gayatri. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 18.3*.

- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiraswasta, Fani. 2017. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). Tesis. Malang. Universitas Brawijaya.
- Yuliana. 2014. Pengaruh Pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 05.
- Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Tesis. Semarang, Universitas Diponegoro



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2,012	2,013	2,014	2,015	2,016
1	Kab. Banjarnegara	10,473,363	11,043,083	11,629,846	12,266,046	12,929,657
2	Kab. Banyumas	25,982,158	27,793,138	29,367,687	31,164,876	33,051,047
3	Kab. Batang	10,488,457	11,104,697	11,693,897	12,327,739	12,935,491
4	Kab. Blora	11,116,866	11,712,505	12,227,201	12,882,588	15,913,432
5	Kab. Boyolali	15,369,974	16,266,499	17,148,351	18,160,984	19,118,756
6	Kab. Brebes	22,482,263	23,812,057	25,074,172	26,572,835	27,867,371
7	Kab. Cilacap	79,702,238	81,022,670	83,391,500	88,347,607	92,820,362
8	Kab. Demak	12,823,227	13,499,226	14,078,420	14,913,838	15,665,205
9	Kab. Grobogan	13,842,047	14,474,729	15,064,457	15,962,619	16,674,630
10	Kab. Jepara	14,824,996	15,623,739	16,374,715	17,200,366	18,063,135
11	Kab. Karanganyar	18,219,457	19,256,516	20,262,444	21,286,287	22,428,804
12	Kab. Kebumen	13,707,057	14,333,333	15,163,092	16,115,554	16,916,220
13	Kab. Kendal	21,075,717	22,386,124	23,536,834	24,771,543	26,159,087
14	Kab. Klaten	19,102,403	20,241,429	21,424,522	22,558,976	23,717,931
15	Kab. Kudus	57,440,811	59,944,557	62,600,681	65,041,048	66,688,491
16	Kab. Magelang	16,071,143	17,020,756	17,936,288	18,838,352	19,855,844
17	Kab. Pati	21,072,329	22,329,694	23,365,214	24,752,325	26,039,955
18	Kab. Pekalongan	11,354,850	12,034,806	12,630,369	13,234,564	13,917,702
19	Kab. Pemalang	12,477,235	13,172,064	13,898,669	14,673,696	15,463,801
20	Kab. Purbalingga	12,138,445	12,778,311	13,397,713	14,125,812	14,796,925
21	Kab. Purworejo	9,406,243	9,870,970	10,312,938	10,866,646	11,426,355
22	Kab. Rembang	9,277,163	9,780,750	10,284,274	10,850,269	11,418,009

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
23	Kab. Semarang	24,306,718	25,758,121	27,264,113	28,769,678	30,286,381
24	Kab. Sragen	17,902,105	19,102,182	20,169,825	21,390,871	22,614,622
25	Kab. Sukoharjo	18,342,247	19,401,889	20,449,010	21,612,078	22,836,644
26	Kab. Tegal	16,912,250	18,050,292	18,958,841	19,992,675	21,265,717
27	Kab. Temanggung	10,740,983	11,299,343	11,867,680	12,486,495	13,110,796
28	Kab. Wonogiri	14,605,088	15,303,280	16,107,795	16,977,199	17,862,652
29	Kab. Wonosobo	9,935,905	10,333,757	10,828,169	11,353,870	11,949,926
30	Kota Magelang	4,484,268	4,755,092	4,992,113	5,247,341	5,518,685
31	Kota Pekalongan	5,151,814	5,456,197	5,755,282	6,043,096	6,367,273
32	Kota Salatiga	6,574,907	6,989,045	7,378,043	7,759,182	8,164,810
33	Kota Semarang	91,282,029	96,985,402	103,109,875	109,088,690	115,298,167
34	Kota Surakarta	24,123,782	25,631,681	26,984,359	28,453,494	29,966,373
35	Kota Tegal	7,650,480	8,084,176	8,491,325	8,953,880	9,442,941

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2018

**LAMPIRAN 2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012-2016**

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Banjarnegara	94,271,467,989	98,975,318,350	161,652,537,773	180,561,068,549	221,048,387,512
2	Kab. Banyumas	242,106,509,318	308,349,434,319	435,597,688,642	502,281,349,460	541,418,386,912
3	Kab. Batang	84,720,049,515	143,502,571,339	172,638,212,952	179,721,273,968	209,957,559,449
4	Kab. Blora	81,987,007,133	95,192,786,972	144,724,169,929	156,402,924,037	171,277,522,706
5	Kab. Boyolali	127,725,206,935	160,752,449,651	227,516,495,964	260,633,637,928	292,310,032,226
6	Kab. Brebes	101,806,858,005	133,836,336,686	267,770,613,635	301,953,709,818	339,156,063,168
7	Kab. Cilacap	196,673,442,195	278,507,545,940	374,023,664,013	409,845,660,919	428,598,349,897
8	Kab. Demak	105,363,369,637	138,214,446,133	220,329,949,471	254,324,487,512	287,457,500,571
9	Kab. Grobogan	105,463,320,984	143,586,365,567	235,295,346,622	272,718,439,175	334,951,418,168
10	Kab. Jepara	129,076,570,089	133,778,055,195	231,673,059,919	270,251,582,727	322,509,753,285
11	Kab. Karanganyar	116,706,893,419	161,715,929,349	215,298,860,199	255,445,549,750	301,307,800,956
12	Kab. Kebumen	102,374,370,560	131,481,736,502	242,079,502,075	245,159,255,421	291,016,321,703
13	Kab. Kendal	120,162,135,739	136,029,702,522	215,294,086,780	239,564,403,981	265,074,406,548
14	Kab. Klaten	84,755,834,704	115,441,420,053	177,922,415,860	190,622,670,128	224,197,408,481
15	Kab. Kudus	121,017,026,873	144,995,092,035	234,073,380,352	255,284,092,548	279,239,106,717
16	Kab. Magelang	123,722,781,349	173,253,651,914	242,448,677,267	261,569,091,783	288,485,678,128
17	Kab. Pati	163,733,665,531	169,127,415,979	279,254,884,135	310,063,640,827	314,921,084,791
18	Kab. Pekalongan	114,793,365,902	147,687,255,201	255,037,017,191	251,558,970,834	310,572,581,552
19	Kab. Pemalang	97,951,207,914	136,362,281,618	217,345,439,974	230,435,212,865	275,458,054,016
20	Kab. Purbalingga	103,755,698,257	122,858,738,938	202,593,689,614	215,622,047,787	251,816,668,602
21	Kab. Purworejo	98,262,003,374	127,565,801,410	200,258,601,329	233,934,134,286	255,599,240,424
22	Kab. Rembang	103,304,514,981	126,808,083,812	165,530,925,487	193,122,759,857	234,168,365,751
23	Kab. Semarang	156,104,007,119	215,679,554,472	248,213,019,938	278,851,900,617	318,536,051,176
24	Kab. Sragen	127,695,844,300	146,721,552,108	254,392,449,817	267,711,820,479	297,176,332,577
25	Kab. Sukoharjo	164,954,318,824	192,971,720,442	264,814,413,083	313,947,492,011	363,163,428,162
26	Kab. Tegal	118,741,620,057	156,244,859,788	253,716,602,369	304,000,970,135	316,051,189,734
27	Kab. Temanggung	78,514,689,212	102,080,197,094	160,726,943,432	212,498,139,929	281,328,148,970

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
28	Kab. Wonogiri	100,037,192,306	111,592,606,315	182,149,063,108	211,208,601,200	218,604,854,595
29	Kab. Wonosobo	82,335,296,457	108,729,508,524	175,319,364,867	182,607,628,797	199,894,767,510
30	Kota Magelang	91,314,601,697	107,739,838,961	164,927,631,230	186,677,410,081	220,315,848,702
31	Kota Pekalongan	91,205,786,310	114,252,438,719	144,065,424,017	152,044,596,332	178,604,460,870
32	Kota Salatiga	77,798,870,961	106,100,450,499	165,747,645,080	167,010,555,173	203,768,652,017
33	Kota Semarang	779,616,535,593	925,919,310,506	1,138,367,228,493	1,201,581,778,459	1,491,645,900,065
34	Kota Surakarta	231,672,100,429	298,400,846,632	335,660,206,641	372,798,426,790	425,502,779,064
35	Kota Tegal	156,663,027,896	176,377,335,075	241,936,166,929	271,601,407,419	287,343,889,954

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), 2018.



LAMPIRAN 3: Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**Tahun 2012-2016**

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Banjarnegara	681,395,924,000	763,426,566,000	826,044,419,000	862,810,552,000	976,642,965,000
2	Kab. Banyumas	991,945,010,000	1,127,939,938,000	1,224,710,992,000	1,277,833,796,000	1,398,539,653,000
3	Kab. Batang	577,238,039,000	641,663,630,000	682,182,894,000	706,782,246,000	790,848,003,000
4	Kab. Blora	673,180,530,000	753,830,036,000	823,874,089,000	848,823,612,000	943,325,498,000
5	Kab. Boyolali	780,301,856,000	871,685,981,000	943,220,456,000	968,089,632,000	1,032,744,010,000
6	Kab. Brebes	981,051,188,000	1,098,999,510,000	1,186,969,845,000	1,234,338,079,000	1,339,381,605,000
7	Kab. Cilacap	1,057,808,013,000	1,197,315,060,000	1,291,121,704,000	1,332,536,848,000	1,384,695,514,000
8	Kab. Demak	658,971,337,000	737,911,647,000	795,874,748,000	833,041,455,000	908,643,744,000
9	Kab. Grobogan	812,990,740,000	906,666,365,000	977,675,512,000	1,008,901,500,000	1,110,337,027,000
10	Kab. Jepara	712,740,462,000	814,380,324,000	887,768,694,000	935,771,120,000	1,000,373,359,000
11	Kab. Karanganyar	720,918,512,000	810,216,582,000	870,001,752,000	906,446,527,000	996,164,049,000
12	Kab. Kebumen	906,222,007,000	1,021,871,180,000	1,125,568,884,000	1,146,008,708,000	1,256,068,249,000
13	Kab. Kendal	702,708,128,000	788,134,078,000	852,170,849,000	884,901,572,000	972,952,576,000
14	Kab. Klaten	967,284,829,000	1,066,318,427,000	1,142,586,588,000	1,164,196,398,000	1,204,344,586,098
15	Kab. Kudus	637,615,372,000	719,406,935,000	795,851,851,000	784,919,177,000	822,153,771,000
16	Kab. Magelang	816,732,604,000	899,528,369,000	965,124,427,000	996,070,014,000	1,078,981,977,000
17	Kab. Pati	850,377,211,000	960,479,326,000	1,043,498,355,000	1,086,645,667,000	1,207,508,997,000
18	Kab. Pekalongan	678,713,899,000	768,500,117,000	831,579,000,000	862,011,706,000	926,571,243,000
19	Kab. Pemalang	827,163,222,000	931,426,998,000	1,016,813,333,000	1,058,982,530,000	1,197,916,501,000
20	Kab. Purbalingga	640,265,476,000	719,185,020,000	777,989,499,000	805,222,229,000	897,337,823,000

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
21	Kab. Purworejo	711,741,839,000	793,904,679,000	854,737,495,000	875,528,049,000	940,778,244,000
22	Kab. Rembang	570,454,948,000	640,273,360,000	700,774,721,000	723,091,447,000	785,380,985,000
23	Kab. Semarang	691,271,583,000	778,604,920,000	848,736,010,000	876,672,925,000	968,848,031,000
24	Kab. Sragen	778,668,035,000	869,155,545,000	946,826,641,000	977,443,589,000	1,067,774,278,000
25	Kab. Sukoharjo	680,235,009,000	763,462,900,000	826,891,481,000	854,457,636,000	959,910,211,435
26	Kab. Tegal	860,568,434,000	957,576,304,000	1,044,211,310,000	1,085,545,293,000	11,621,021,110,000
27	Kab. Temanggung	584,158,278,000	651,171,674,000	708,764,753,000	731,733,741,000	807,995,010,000
28	Kab. Wonogiri	828,479,528,000	917,476,557,000	1,001,378,439,000	1,031,393,472,000	1,145,434,277,000
29	Kab. Wonosobo	597,858,484,000	665,548,034,000	724,245,009,000	748,447,761,000	841,407,175,000
30	Kota Magelang	348,498,193,000	385,859,241,000	417,211,449,000	418,257,922,000	447,909,575,000
31	Kota Pekalongan	347,390,356,000	384,489,368,000	412,871,094,000	421,276,527,000	457,085,256,000
32	Kota Salatiga	325,710,016,000	358,331,867,000	399,083,343,000	400,176,755,000	456,079,561,000
33	Kota Semarang	936,865,926,000	1,054,002,569,000	1,104,739,473,000	1,126,847,634,000	1,211,708,204,000
34	Kota Surakarta	595,222,827,000	659,647,382,000	710,803,934,000	713,300,856,000	841,536,122,000
35	Kota Tegal	334,819,065,000	370,642,983,000	390,732,536,000	405,831,088,000	490,772,001,000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), 2018.

**LAMPIRAN 4: Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2016**

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Banjarnegara	67,730,850,000	69,482,630,000	61,066,040,000	133,441,500,000	252,046,683,715
2	Kab. Banyumas	118,901,780,000	78,662,730,000	82,519,140,000	87,526,800,000	412,853,809,576
3	Kab. Batang	54,673,900,000	49,792,440,000	52,176,600,000	79,498,400,000	203,972,546,139
4	Kab. Blora	53,989,760,000	53,492,890,000	61,140,660,000	98,119,410,000	277,435,119,000
5	Kab. Boyolali	60,360,690,000	59,233,500,000	81,095,720,000	88,962,940,000	279,575,054,900
6	Kab. Brebes	84,451,160,000	82,628,900,000	97,975,310,000	118,191,060,000	361,801,358,000
7	Kab. Cilacap	87,652,460,000	108,157,350,000	110,203,960,000	173,385,700,000	483,813,446,054
8	Kab. Demak	81,553,310,000	76,556,190,000	74,599,670,000	100,060,600,000	306,941,212,573
9	Kab. Grobogan	97,055,020,000	104,304,440,000	85,838,690,000	131,245,950,000	153,405,146,650
10	Kab. Jepara	76,460,530,000	67,487,370,000	81,294,110,000	136,519,050,000	339,310,214,684
11	Kab. Karanganyar	55,514,410,000	55,203,060,000	57,238,710,000	98,090,620,000	352,752,915,080
12	Kab. Kebumen	100,103,330,000	79,063,860,000	80,709,170,000	166,313,240,000	480,415,539,065
13	Kab. Kendal	63,884,980,000	41,931,490,000	47,886,615,000	58,360,304,000	228,131,891,000
14	Kab. Klaten	74,501,530,000	61,175,420,000	66,576,420,000	77,379,170,000	318,994,589,110
15	Kab. Kudus	58,346,760,000	52,208,880,000	41,391,675,000	61,238,184,000	228,303,262,665
16	Kab. Magelang	103,595,180,000	43,096,223,000	48,736,118,000	50,907,384,000	83,510,170,410
17	Kab. Pati	80,449,020,000	72,903,370,000	79,852,630,000	92,717,380,000	327,576,149,212
18	Kab. Pekalongan	77,029,380,000	60,587,590,000	60,380,950,000	89,642,610,000	222,507,471,000
19	Kab. Pemalang	92,869,030,000	63,504,568,000	54,018,555,000	110,616,990,000	270,426,675,208
20	Kab. Purbalingga	75,989,640,000	66,641,060,000	57,267,330,000	72,251,830,000	242,375,709,820
21	Kab. Purworejo	69,568,400,000	53,323,020,000	57,024,620,000	85,821,190,000	339,417,614,546
22	Kab. Rembang	78,350,660,000	42,098,910,000	46,206,000,000	98,419,408,000	107,558,652,000
23	Kab. Semarang	67,737,200,000	59,113,470,000	67,407,340,000	40,654,310,000	310,780,221,524
24	Kab. Sragen	69,378,280,000	61,857,560,000	76,469,300,000	149,737,340,000	333,935,980,704
25	Kab. Sukoharjo	47,616,310,000	53,124,680,000	56,904,480,000	68,771,690,000	287,044,558,458
26	Kab. Tegal	74,555,350,000	72,524,910,000	63,646,823,000	68,489,256,000	290,589,280,983
27	Kab. Temanggung	87,303,720,000	41,627,621,000	56,702,810,000	72,728,590,000	199,009,572,278

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
28	Kab. Wonogiri	75,052,100,000	75,705,890,000	59,392,120,000	86,117,520,000	289,121,067,975
29	Kab. Wonosobo	55,970,270,000	57,950,180,000	59,423,010,000	56,541,744,000	198,974,002,000
30	Kota Magelang	20,667,810,000	20,644,487,000	22,365,783,000	25,774,760,000	89,394,073,463
31	Kota Pekalongan	27,126,720,000	34,721,100,000	34,173,710,000	45,408,120,000	109,412,669,154
32	Kota Salatiga	27,639,760,000	16,958,760,000	24,042,788,000	33,981,288,000	83,698,193,202
33	Kota Semarang	72,270,900,000	14,993,022,000	29,236,965,000	46,661,150,000	246,886,746,970
34	Kota Surakarta	28,972,180,000	32,893,036,000	43,848,110,000	3,750,100,000	196,724,020,000
35	Kota Tegal	30,554,770,000	30,039,185,000	22,933,763,000	74,377,832,000	165,828,134,725

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2018.



**LAMPIRAN 5: Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun
2012-2016**

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Banjarnegara	45,615,657,657	46,788,081,639	28,672,247,561	27,425,449,207	35,379,420,897
2	Kab. Banyumas	87,043,605,039	64,781,445,125	51,305,275,338	46,326,481,480	57,703,885,214
3	Kab. Batang	45,796,203,613	36,092,499,854	32,222,748,761	28,619,261,343	36,645,424,250
4	Kab. Blora	90,371,797,931	94,501,754,069	89,559,359,181	72,722,131,124	110,850,744,558
5	Kab. Boyolali	52,915,755,422	37,681,928,865	36,002,551,801	35,288,695,915	46,125,444,420
6	Kab. Brebes	61,858,407,843	66,654,043,909	52,809,044,863	34,592,771,800	45,826,698,841
7	Kab. Cilacap	104,581,644,132	79,297,931,881	66,480,735,255	57,045,195,187	72,636,973,831
8	Kab. Demak	56,937,721,048	61,590,836,458	51,123,044,748	42,836,070,922	51,315,790,629
9	Kab. Grobogan	66,770,846,098	63,924,773,793	67,231,012,336	46,067,092,310	56,510,215,649
10	Kab. Jepara	64,234,783,057	56,976,579,033	43,097,774,239	32,960,277,896	43,932,231,816
11	Kab. Karanganyar	60,645,217,710	35,287,879,585	28,588,768,444	27,243,362,616	41,236,369,287
12	Kab. Kebumen	49,989,322,838	34,564,265,803	27,498,627,950	30,994,004,370	43,287,944,721
13	Kab. Kendal	79,257,929,337	80,021,146,469	64,347,674,040	53,310,294,245	62,908,768,657
14	Kab. Klaten	56,376,058,447	47,125,348,741	41,463,345,033	38,414,990,283	50,275,933,273
15	Kab. Kudus	129,593,027,520	182,896,969,776	175,108,008,176	187,347,767,258	240,510,038,401
16	Kab. Magelang	58,816,580,106	43,990,943,111	33,580,069,157	33,120,454,660	50,834,584,009
17	Kab. Pati	66,718,354,124	61,481,767,993	40,580,008,710	35,611,941,666	44,349,751,185
18	Kab. Pekalongan	35,201,288,807	27,389,237,030	28,705,392,098	26,500,021,307	33,291,841,011
19	Kab. Pemalang	45,562,190,210	34,270,008,058	29,567,028,758	31,418,194,717	39,469,913,885
20	Kab. Purbalingga	41,349,239,096	44,743,100,496	33,120,213,877	23,891,824,755	36,099,689,040
21	Kab. Purworejo	46,890,511,834	33,506,087,903	26,253,270,581	25,192,547,903	35,510,298,310
22	Kab. Rembang	43,592,546,559	34,411,514,793	28,882,462,184	31,211,494,235	43,004,058,312
23	Kab. Semarang	50,779,618,997	41,391,323,026	39,852,319,272	34,923,732,517	46,151,509,596
24	Kab. Sragen	42,195,191,456	43,766,773,909	28,213,906,538	26,875,051,941	40,870,465,967
25	Kab. Sukoharjo	32,764,394,918	27,938,065,286	23,475,992,411	21,411,266,926	30,990,667,000
26	Kab. Tegal	55,861,892,819	41,743,816,550	34,564,802,437	32,554,722,696	40,792,559,417
27	Kab. Temanggung	35,777,146,911	50,228,458,791	43,511,964,761	45,507,112,934	55,551,255,813

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
29	Kab. Wonosobo	43,765,552,625	34,640,804,684	40,988,318,009	31,393,027,154	38,789,323,015
30	Kota Magelang	20,667,810,000	24,609,560,290	20,207,973,171	18,772,034,465	30,333,059,082
31	Kota Pekalongan	35,483,212,280	31,009,410,779	28,224,678,764	24,493,648,665	32,123,238,676
32	Kota Salatiga	33,687,801,686	28,573,341,133	26,626,367,951	21,824,580,940	30,072,083,681
33	Kota Semarang	158,102,699,118	122,101,932,757	140,790,952,279	96,862,487,674	185,682,778,746
34	Kota Surakarta	86,074,776,706	57,526,347,441	42,642,973,689	38,677,463,465	65,599,599,264
35	Kota Tegal	29,389,100,687	29,817,134,526	23,777,788,261	20,641,047,265	31,599,100,468

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP), 2018.



LAMPIRAN 6: Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	KabBanjarnegara	158,300,839,118	175,918,010,287	206,494,161,626	329,811,474,920	487,535,630,129
2	KabBanyumas	234,952,033,690	313,188,975,057	360,164,898,641	362,744,753,623	400,832,864,576
3	KabBatang	133,480,484,849	148,222,973,774	157,304,196,255	193,435,878,499	223,872,059,440
4	KabBlora	219,107,694,569	260,455,399,862	335,136,756,246	326,177,548,362	434,953,823,988
5	KabBoyolali	207,758,567,336	249,111,725,695	303,852,817,878	310,175,465,196	373,915,606,382
6	KabBrebes	192,983,349,017	325,840,766,312	282,972,400,128	469,584,321,351	784,627,878,376
7	KabCilacap	308,872,107,738	421,186,662,714	414,435,433,036	582,530,966,205	843,986,253,460
8	KabDemak	339,017,860,052	352,309,888,384	540,353,998,879	549,774,746,448	635,402,747,952
9	KabGrobogan	190,074,980,581	353,074,204,294	300,522,182,667	294,827,977,086	494,861,083,220
10	KabJepara	297,197,282,495	158,798,848,275	188,924,407,454	330,419,498,662	397,078,618,167
11	KabKaranganyar	122,761,422,121	148,478,744,026	223,287,900,900	241,652,801,331	382,070,380,920
12	KabKebumen	295,209,004,417	286,958,914,202	465,778,357,808	468,153,450,416	649,703,102,744
13	KabKendal	192,581,645,739	155,398,900,968	261,586,075,722	282,090,070,438	322,193,950,034
14	KabKlaten	182,607,367,867	186,883,543,096	268,557,035,809	306,072,310,863	220,759,237,283
15	KabKudus	178,143,373,570	132,972,459,152	256,850,820,705	451,330,309,179	678,205,766,264
16	KabMagelang	95,350,817,769	108,603,624,493	319,022,187,365	253,851,809,152	353,167,692,583
17	KabPati	174,150,125,776	203,474,443,723	224,653,195,934	279,135,035,536	419,719,878,687
18	KabPekalongan	124,487,024,005	184,320,225,104	187,872,466,874	190,291,494,232	237,938,808,969
19	KabPemalang	128,366,719,130	249,976,019,799	164,388,705,445	267,766,979,163	246,080,497,261
20	KabPurbalingga	126,673,450,871	112,767,369,781	112,249,667,286	170,645,780,046	299,154,094,460
21	KabPurworejo	149,104,919,641	180,854,184,775	216,762,938,712	252,290,086,056	274,262,561,414
22	KabRembang	200,203,657,195	135,447,797,344	151,454,913,762	51,980,727,019	345,545,721,301
23	KabSemarang	264,416,603,227	227,584,378,658	272,265,415,043	229,910,573,491	381,464,589,453
24	KabSragen	125,506,270,939	141,263,725,821	267,219,055,054	324,140,892,998	325,396,924,022
25	KabSukoharjo	209,691,364,140	209,691,364,140	197,957,953,910	265,948,514,720	327,611,459,445
26	KabTegal	303,315,035,099	215,975,068,911	226,087,648,919	255,207,688,302	516,642,310,814
27	KabTemanggung	162,080,116,908	103,805,509,274	198,451,766,079	320,338,494,109	398,487,295,909
28	KabWonogiri	185,814,439,241	192,048,802,286	223,887,556,535	311,990,827,171	404,553,582,240

No.	Pemerintah Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
29	KabWonosobo	189,467,145,999	138,195,097,852	206,098,010,151	257,421,064,913	146,992,770,635
30	KotaMagelang	79,135,573,987	142,588,509,967	127,622,979,216	141,308,934,005	221,924,457,916
31	KotaPekalongan	103,505,884,837	131,315,591,230	159,183,156,133	157,668,840,341	201,951,325,331
32	KotaSalatiga	124,905,280,107	69,203,906,339	120,272,968,726	107,149,176,492	267,294,856,864
33	KotaSemarang	351,853,782,249	591,011,412,262	800,181,230,907	726,139,722,089	1,026,716,904,816
34	KotaSurakarta	186,150,293,855	244,975,523,723	286,491,756,994	235,829,590,702	307,534,354,570
35	KotaTegal	73,304,442,700	100,804,466,696	115,598,831,594	207,499,062,149	248,511,286,786

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), 2018.



LAMPIRAN 7: Tabel Hasil Uji Chow

Hasil uji Chow persamaan struktural I

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ_BM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.271710	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	104.596990	34	0.0000

Sumber : Hasil olah data statistik Eviews 9

Hasil uji Chow persamaan struktural II

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ_PE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	676.425898	(34,135)	0.0000
Cross-section Chi-square	900.158252	34	0.0000

Sumber : Hasil olah data statistik Eviews 9

LAMPIRAN 8: Tabel Hasil Uji Hausman

Hasil uji Hausman persamaan struktural I

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ_BM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.307321	4	0.0539

Sumber : Hasil olah data statistik Eviews 9

Hasil uji Hausman persamaan struktural II

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ_PE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.258048	5	0.0040

Sumber : Hasil olah data statistik Eviews 9

LAMPIRAN 9: Tabel Hasil Uji Langrange Multiplier

Hasil uji Lagrange Multiplier persamaan struktural I

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	24.14310 (0.0000)	0.382963 (0.5360)	24.52606 (0.0000)
Honda	4.913563 (0.0000)	-0.618840 --	3.036828 (0.0012)
King-Wu	4.913563 (0.0000)	-0.618840 --	1.008806 (0.1565)
Standardized Honda	5.385759 (0.0000)	0.032707 (0.4870)	-0.864210 --
Standardized King-Wu	5.385759 (0.0000)	0.032707 (0.4870)	-1.776413 --
Gourieriou, et al.*	--	--	24.14310 (< 0.01)

Sumber : Hasil olah data statistik Eviews 9

Hasil uji Lagrange Multiplier persamaan struktural II

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	272.2410 (0.0000)	1.334985 (0.2479)	273.5760 (0.0000)
Honda	16.49973 (0.0000)	-1.155415 --	10.85007 (0.0000)
King-Wu	16.49973 (0.0000)	-1.155415 --	4.260305 (0.0000)
Standardized Honda	17.42513 (0.0000)	-0.712161 --	8.465112 (0.0000)
Standardized King-Wu	17.42513 (0.0000)	-0.712161 --	2.625267 (0.0043)
Gourieriou, et al.*	--	--	272.2410 (< 0.01)

Sumber : Hasil olah data statistik Eviews 9

LAMPIRAN 10: Tabel Hasil Regresi

Hasil regresi persamaan struktural I *Random Effect Model* (REM)

Dependent Variable: BM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/01/18 Time: 22:57

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.512372	2.450484	-1.025256	0.3067
PAD	0.512425	0.058143	8.813223	0.0000
DAU	0.256374	0.089191	2.874427	0.0046
DAK	0.144760	0.033656	4.301160	0.0000
DBH	0.192399	0.063494	3.030194	0.0028
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.166264	0.2998
Idiosyncratic random			0.254066	0.7002
Weighted Statistics				
R-squared	0.608793	Mean dependent var		14.78393
Adjusted R-squared	0.599588	S.D. dependent var		0.407725
S.E. of regression	0.258001	Sum squared resid		11.31597
F-statistic	66.13805	Durbin-Watson stat		1.726173
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.644793	Mean dependent var		26.20253
Sum squared resid	16.27435	Durbin-Watson stat		1.200251

Sumber : Hasil olah data statistik Eviews 9

Hasil regresi persamaan struktural II *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: PE

Method: Panel Least Squares

Date: 05/14/18 Time: 15:50

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.564049	0.616777	15.50649	0.0000
PAD	0.177967	0.013229	13.45264	0.0000
DAU	0.020732	0.014744	1.406139	0.1620
DAK	0.019735	0.005288	3.732065	0.0003
DBH	0.026115	0.016418	1.590603	0.1140
BM	0.022699	0.010282	2.207691	0.0290
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.996288	Mean dependent var	16.49367	
Adjusted R-squared	0.995215	S.D. dependent var	0.440399	
S.E. of regression	0.030464	Akaike info criterion	-3.946939	
Sum squared resid	0.125284	Schwarz criterion	-3.223560	
Log likelihood	385.3572	Hannan-Quinn criter.	-3.653516	
F-statistic	928.9694	Durbin-Watson stat	1.682517	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil olah data statistik Eviews 9